

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ExxonMobil
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKITAR**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

IKVINA MAGHFIR

NIM. 0710310040

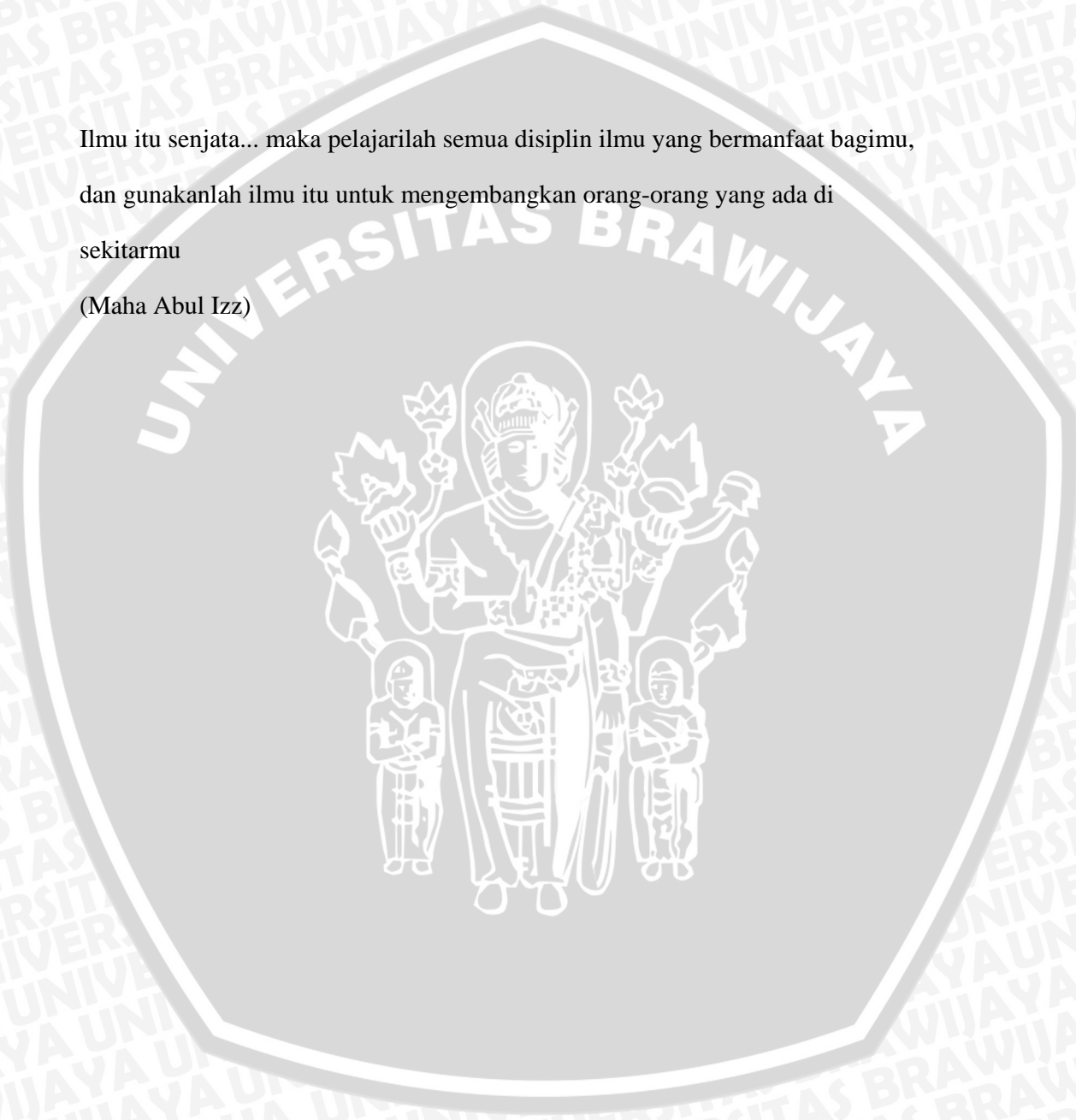


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2011**

MOTTO

Ilmu itu senjata... maka pelajarilah semua disiplin ilmu yang bermanfaat bagimu,
dan gunakanlah ilmu itu untuk mengembangkan orang-orang yang ada di
sekitarmu

(Maha Abul Izz)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

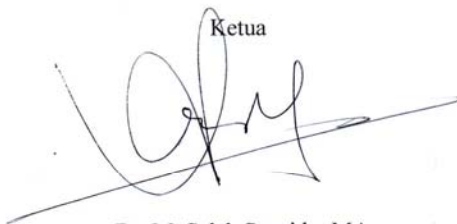
Judul : Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility*
(CSR) ExxonMobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak
Banyu Urip Kabupeten Bojonegoro)

Disusun Oleh : Ikvina Maghfir
NIM : 0710310040
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -

Malang, 19 Mei 2011

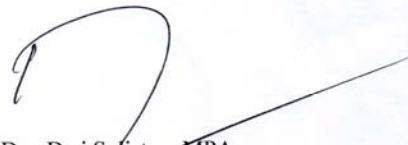
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA.
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Dwi Sulistyono, MPA
NIP. 1959052 198403 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ikvina Maghfir, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis asla.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Malang, (27 April 2011)

Yang membuat pernyataan,



(Ikvina Maghfir)

NIM: 0710310040

RINGKASAN

Ikvina Maghfir, 2011, Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil. Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro), Dr. M. Saleh Soeaidy, MA; Drs. Dwi Sulisty, MPA, 124 Hal + xiv.

Skripsi ini berjudul **Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro)**. Dengan rumusan masalah bagaimana implementasi dan peran kebijakan CSR terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar Sumur Minyak Banyu Urip, dan kendala-kendala. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan CSR ExxonMobil terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, meliputi: mekanisme pelaksanaan, pola pelaksanaan dan keberlanjutan program CSR, output program CSR; Peran kebijakan *Corporate Social Responsibility*; dan kendala-kendala dalam Implementasi CSR.

Metode dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan studi kasus, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan. Analisis data dengan analisis deskriptif pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman dengan langkah-langkah; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, ExxonMobil mendelegasikan anak perusahaannya yakni Mobil Cepu Ltd dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan sepenuhnya, meliputi ganti rugi lahan dan program pemberdayaan masyarakat terkait dalam tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi, termasuk juga perbaikan infrastruktur telah memberikan perubahan signifikan dan berjalan efektif. Kendala-kendala yang ditemui adalah pemahaman CSR yang beragam dan keterbatasan SDM dalam mekanisme pelaksanaan CSR.

Dengan adanya program CSR anak perusahaan ExxonMobil, yakni Mobil Cepu Ltd. diharapkan dapat membantu tugas pemerintah daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip yang berpotensi merasakan dampak lingkungan dari proses produksi Minyak dan Gas ExxonMobil. Dalam pelaksanaan CSR yang ada tidak hanya untuk kepentingan citra perusahaan saja, tetapi lebih ditekankan pada komitmen perusahaan untuk ikut melaksanakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan UUPT No.40 Tahun 2007. Menjelaskan bahwa melalui undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, dalam konteks inilah aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi agenda wajib bagi perusahaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci : CSR (*Corporate Social Responsibility*),

SUMMARY

Ikvina Maghfir, 2011, The Implementing Policy of ExxonMobil Corporate Social Responsibility (CSR) to Communities Welfare (A Case Study of Banyu Urip Oil Wells Surrounding Communities at Bojonegoro Regency), Supervisor: Dr. M. Saleh Soeaidy, MA; Co.Supervisor: Drs. Dwi Sulisty, MPA, 124 page + xiv.

The title of my research was the implementing policy of ExxonMobil Corporate Social Responsibility (CSR) to communities welfare (a case study of Banyu Urip oil wells surrounding communities at Bojonegoro Regency). The problem formulation were how the CSR implementation and what roles played by CSR policy to the fulfillment of social welfare in Banyu Urip Oil Wells surrounding areas were, and what constraints faced by ExxonMobil in the implementation of CSR were. This research focused to the implementation of ExxonMobil CSR policy against Banyu Urip oil wells surrounding communities, including: implementation mechanism, CSR program implementation pattern and sustainability, CSR program output; the role of Corporate Social Responsibility policy, and constraints in CSR implementation.

The method in this study was analyzed descriptive qualitatively with case study approach, that is to say secondary data in the form of theories, definitions and the substances from various literature and laws and regulations, as well as primary data obtained by executing interviews, observation and field study. Data analysis used descriptive analysis with qualitative approach according to Miles and Huberman including data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification steps.

The research result show that of this study explained that in carrying out its social responsibility, ExxonMobil, subsidiary company is Mobil Cepu Ltd conducted land indemnity and community empowerment activities related to three areas, namely education, health and economic development, including infrastructure improvement. Constraints faced was diverse understanding of CSR, which would lead to conflicts among villages and caused social jealousy. The constraint was multiple diverse corporate social responsibility comprehension and limited human resource in the implementation of CSR mechanism.

ExxonMobil CSR program was expected to assist local government task in the development and community welfare, especially communities around Banyu Urip oil wells that potentially felt the environmental impacts of ExxonMobil Oil and Gas production process. The implementation of existed CSR was not just for the sake of corporate image, but emphasized more on company's commitment to participate in the development of community welfare, in accordance with Corporate Law No.40 Year 2007. Through this legislation it was explained that industries or corporate companies were obliged to implement it, in this context that Corporate Social Responsibility (CSR) activities became compulsory agenda for companies convenient with regulations obligations of law.

Keyword: CSR (*Corporate Social Responsibility*)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility ExxonMobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro)**” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik/Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, yang secara empiris telah memberikan dukungan moral.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Pembantu Dekan I sekaligus Penguji I yang telah memberikan saran perbaikan dan masukan bagi sempurnanya skripsi ini.
3. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik sekaligus Penguji II yang telah memberikan masukan, kritik dan saran akan sempurnanya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Saleh Soeaidy, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai dengan hasil yang memuaskan.
5. Bapak Drs. Dwi Sulistiyo, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan moral, bimbingan, dan berbagai saran serta kritik atas selesainya skripsi ini.

6. Bapak Arnasz Setiawan, ST selaku Kasubag Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi tempat penelitian skripsi saya.
7. Bapak Ichwan Arifin selaku Communication Coordinator ExxonMobil.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Mei 2011

Ikvina Maghfir



DAFTAR ISI

MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan Penelitian	6
D Kontribusi Penelitian	7
E Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
B Konsep Kebijakan Publik	22
C <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	26
1. Definisi <i>Social Responsibility</i> (CSR)	26
2. Arti Penting <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	28
3. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	30
4. <i>Community Development</i> Sebagai bagian dari CSR	32
5. Hubungan CSR dengan kesejahteraan.....	33
a. Konsep <i>Triple Bottom Line</i>	34
b. Teori Michael Porter.....	35
6. Konteks Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	48
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
2. Sejarah dan Gambaran Umum ExxonMobil.....	53
3. Prinsip Kerja ExxonMobil.....	53

4. Community Engagement ExxonMobil (SOP)	55
5. Kegiatan Usaha ExxonMobil	58
6. Misi dan Tujuan CSR ExxonMobil.....	60
7. Pedoman Kegiatan CSR ExxonMobil.....	61
B. Data Fokus Penelitian	60
1. Implementasi Kebijakan CSR ExxonMobil.....	60
a. Mekanisme, pola pelaksanaan dan keberlanjutan program...	63
b. Output program CSR ExxonMobil	65
2. Peran CSR ExxonMobil	68
3. Kendala-kendala dalam implementasi CSR ExxonMobil.....	87
C. Analisis Data	89
1. Implementasi Kebijakan CSR ExxonMobil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar	89
a. Mekanisme, Pola pelaksanaan dan Kebelanjutan program CSR	96
b. Output Program CSR	99
2. Peran CSR ExxonMobil terhadap Kesejahteraan Masyarakat ...	100
3. Kendala-kendala dalam Implementasi CSR.....	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Interest Stakeholders</i> terhadap Perusahaan.....	32
Tabel 2. Tabel Sasaran Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	64
Tabel 3. Tabel Pendapatan ExxonMobil Corporation.....	88
Tabel 4. Rincian Modal Kredit Usaha Rakyat.....	98
Tabel 5. Prosentase Pertumbuhan Ekonomi.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Operasionalisasi Kebijakan..... 12

Gambar 2. Siklus Sistematis Kebijakan Publik..... 25

Gambar 3. Hubungan Garis Segitiga (*Triple Bottom Line*)..... 35

Gambar 4. Alur Penarikan Kesimpulan Menurut Miles dan Huberman..... 48

Gambar 5. Peta Sumur Minyak Banyu Urip 50

Gambar 6. Gambar Kondisi Sosial Masyarakat Banyu Urip..... 78

Gambar 7. Renovasi Gedung Sekolah..... 85

Gambar 8. Bantuan Fasilitas Komputer..... 92

Gambar 9. Jalan Poros Desa (Pavingisasi)..... 97

Gambar 10. Jalan Poros Desa (Aspal) 98

Gambar 11. Perbaikan Polindes..... 102

Gambar 12. Tower Air 103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat CSR, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan.

Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat merupakan perwujudan dari adanya tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Hal ini sangatlah penting dilakukan, karena sesuatu yang bersifat *social responsible* bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai penumpu kebijakan dalam suatu daerah tertentu, melainkan hal itu merupakan tanggung jawab setiap elemen yang ada seperti pemerintah sebagai penumpu kebijakan, pelaku usaha serta dukungan dari masyarakat.

Perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menciptakan hubungan simbiosis mutualisme dalam menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri, oleh karena itu kebijakan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) sangat benar-benar dibutuhkan, sehingga tanggung jawab sosial benar-benar dapat diwujudkan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru karena CSR sudah dikenal dan dipraktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Dalam pengertiannya yang klasik *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih dipersepsikan sebagai idiologi yang bersifat amal (*charity*) dari pihak pengusaha kepada masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan, begitu pula yang dilakukan oleh ExxonMobil. Menurut Dyah Pitaloka (2010), disamping itu masih banyak pihak yang mengidentikkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *Community Development* (CD). CSR tidak dapat disederhanakan hanya sebatas *Community Development* (CD) karena sesungguhnya secara historis keberadaan *Community Development* (CD) dan CSR sangat berbeda. *Community Development* (CD) merupakan kerelaan perusahaan untuk memberikan berbentuk *benefit* bagi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan pemikiran bahwa keberadaan perusahaan di suatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak-hak masyarakat setempat.

Corporate Social Responsibility (CSR) mensyaratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara etimologi di Indonesia kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga disebut sebagai

tanggung jawab sosial korporasi. Namun apabila disebut salah satunya darinya, konotasinya pastilah kembali kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan.

Untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko tuntutan hukum, dan kepercayaan *partner* serta masyarakat, tidak cukup hanya taat kepada peraturan perundang-undangan. Tekanan secara nasional dan internasional akan terus berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis suatu perusahaan. Tekanan ini datang antara lain dari *shareholders*, *stakeholders* dan *partner* bisnis terutama dari negara yang komunitas bisnisnya peka terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.

Kritik lain dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) identik dengan perusahaan besar yang

ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan adanya program-program yang telah dibuatnya.

Kabupaten Bojonegoro, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blora (Jawa Tengah) di barat. Bagian barat Bojonegoro (perbatasan dengan Jawa Tengah) merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. (Wikipedia diakses pada tanggal 10 November 2010)

Blok Cepu merupakan asset negara yang harus dikembangkan, oleh karena itu pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengelolanya, pengembangan Blok Cepu melalui kerjasama operasi antara tiga pihak, yakni BP-Migas, ExxonMobil Oil yang menunjuk Mobil Cepu Ltd sebagai operator lapangan, dan pemerintah daerah setempat terdiri atas Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, dengan ExxonMobil Oil berkedudukan sebagai operator utama. Bagi hasil keuntungannya adalah 45 persen untuk BP-Migas, 45 persen untuk ExxonMobil Oil, dan 10 persen untuk daerah. Kesepakatan ini dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) dan disahkan dalam perjanjian kerjasama operasi atau joint operating agreement (JOA). (Kompas edisi 3 Juli 2010)

Seiring dengan berjalannya dinamika perkembangan lingkungan yang semakin pesat membutuhkan berbagai inovasi dalam program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar mampu dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dinamika lingkungan perusahaan tersebut seperti adanya tuntutan otonomi daerah, sehingga harapan dan cita-cita kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, akan tetapi kemampuan pemerintah daerah masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan secara menyeluruh. Disinilah peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebuah perusahaan, yaitu ExxonMobil Oil dengan menunjuk Mobil Cepu Ltd. melaksanakan program CSR di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip ini, kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas sehingga kesejahteraan hidup mereka terpenuhi dan mengalami kenaikan.

ExxonMobil melaksanakan program CSR sejak tahun 2006, dengan melakukan pengembangan diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang di daerah kawasan.

Program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sebuah fokus penelitian, namun yang akan dikaji lebih mendalam adalah Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, bahwasannya Banyu Urip ini merupakan sebutan daerah operasi penghasil minyak yang terletak di Desa Kecamatan Ngasem dan berdekatan dengan Kecamatan Kalitidu, daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip ini tergolong sebagai daerah yang kurang kondusif dan

banyak terdapat masyarakat miskin, sehingga membutuhkan kontribusi dari perusahaan asing dalam membantu proses pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkajinya lebih mendalam dalam bentuk proposal skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* ExxonMobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip?
2. Bagaimanakah peran kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip?
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh ExxonMobil dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip.
2. Untuk mengetahui peran kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh ExxonMobil dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial

perusahaan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pentingnya kewajiban untuk menjaga lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan, sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Sedangkan untuk pemerintah manfaat yang dapat diperoleh dari adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dapat memperoleh mitra yang baik dalam pembangunan, juga dapat bersinergi dalam pemberdayaan dalam setiap bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan pemerintah dalam memajukan daerah dan misi perusahaan dapat terwujud dengan maksimal.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi ini secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai Implementasi Kebijakan CSR terhadap masyarakat sumur minyak Banyu Urip. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam bab ini juga dibahas tentang CSR dan landasan teori serta konteks hukum dalam implementasi kebijakan CSR.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, paradigma penelitian. Dibahas pula kriteria kepercayaan dalam penelitian kualitatif serta prosedur-prosedur untuk mempertahankan kredibilitas penelitian kualitatif. Di bagian akhir dijelaskan mengenai metode analisis data kualitatif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan sejarah umum ExxonMobil, Mobil Cepu Ltd serta sumur minyak Banyu Urip. Menjelaskan Implementasi Kebijakan CSR terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilanjutkan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan dimana merupakan tahap yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Wahab (1990:49-50), jika dilihat dari proses implementasinya terdiri dari tiga sudut yaitu :

1. Pemrakarsa Kebijakan Atau Pembuat Kebijakan (The center/pusat)
Fokus implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga ditingkat yang lebih rendah atau diharapkan mereka mau terbuka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Pejabat-Pejabat Pelaksana Di Lapangan (The Periphery)
Fokus implementasi kebijakan adalah pada tindakan atau perilaku pada pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi selama proses implementasi kebijakan berlangsung.
3. Kelompok sasaran (Target Group)
Sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang.

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan pribadi maupun golongan. Pendapat tersebut diperkuat dengan diungkapkannya pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138), yaitu ;

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1990:51), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh George C. Edward III dalam Winarno (2002 : 125-126).

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan , maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (1990:51) implementasi kebijaksanaan sebagai berikut :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara,yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari definisi yang dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tersebut diatas maka dapatlah dijelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran tujuan itu sendiri, dan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Selanjutnya dalam proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan diinterpretasikan menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih operasional lagi program dirumuskan menjadi proyek, selanjutnya diikuti dengan tindakan fisik. Sehingga akhirnya kebijakan menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek atau akibat) yaitu output. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Wibawa. S. (1994:6)

Rangkaian implementasi kebijakan dari bagan tersebut dapat dilihat dengan jelas, yaitu mulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik dimulai dari misi, karena misinya adalah given mission. Kebijakan publik sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut karena memang kaidah tersebut bersifat given atau tidak dapat ditolak.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Sebab pada dasarnya kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (1990:48) membagi kegagalan kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yaitu:

1. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan)

Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja dengan tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya,

sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

2. *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil)

Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Dalam implementasi kebijakan, juga terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam (Keban, 2004:72), mengungkapkan antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi, dan sosial, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang lingkungan, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing), (7) sistem informasi yang kurang memadai, (8) perbedaan agenda tujuan antara actor, (9) dukungan yang berkesinambungan.

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Williams dalam Wahab (1990:47) disebut *implementation capacity* adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melakukan keputusan kebijakan (*Policy Decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijaksanaan dapat dicapai. Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan akan mencapai keberhasilan atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Soenarko (2000:107) terdapat tiga kegiatan pokok yang penting untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu :

1. *Interpretation*, adalah adanya usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui bentuk apa dan bagaimana tujuan akhir (goal) itu harus diwujudkan, harus realisir.
2. *Organization*, adalah adanya usaha untuk koordinasi dan pengendalian (control) yang disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut.
3. *Application*, adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu.

Berikut ada beberapa model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Implementasi kebijaksanaan menurut Grindle dalam Wibawa (1994:22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran; (2) jenis manfaat yang diterima target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah implementornya secara rinci; (6) apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup; (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang

terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan resim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

b. Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Model ini merumuskan sebuah abstrak yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi antar hubungan berbagai faktor. Model ini menekankan standart dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pengambil kebijakan. Kinerja sebagai penilaian atas tingkat tercapainya standart dan sasaran yang telah ditentukan karena standart dan sasaran sebagai kriteria penilaian.

Menurut Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Jadi permasalahan yang hendak dikaji dalam hal ini adalah hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam melakukan perubahan dalam organisasi, seberapa baik tingkat efektivitas mekanisme kontrol pada tiap jenjang struktural. Beberapa variabel:

1. Aktivitas
2. Karakteristik dari agen pelaksana
3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
4. Kecenderungan dari pelaksana

Jadi model ini lebih memperhatikan perubahan internal organisasi dan lebih pada proses manajemen internal organisasi pelaksana tanpa melibatkan

partisipasi publik. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

c. Teori implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

Sedangkan model implementasi kebijaksanaan yang dikembangkan oleh Daniel A. Sabatier ini dalam Wahab (1990:67) lebih dikenal dengan model kerangka analisis implementasi (*A framework for implementation analysis*). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting ini dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- (1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
- (2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
- (3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

d. Model implementasi kebijakan menurut George Edward III

Sedangkan menurut George C. Edward III dalam Widodo (2001:195) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) kecenderungan, (4) struktur

birokrasi. Keempat variabel itu saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing faktor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam Winarno (2002:126-127) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu :

a. Transmisi

Menurut Winarno (2002:127) sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan seperti yang diinginkan, maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas. Karena sering kali terjadi instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana sesuatu program

dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah atau bertentangan dengan makna pesan awal (Winarno, 2002:128).

c. Konsentrasi

Menurut Winarno (2002:128) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan (Agustino, 2006:151). Disisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan (winarno, 2002:128-129)

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan

pelayanan-pelayanan publik (Winarno, 2002:132). Indikator sumber-sumber yang dimaksud terdiri dari :

a. Staf

Menurut Agustino (2006:151) sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dengan keahlian dan kemampuan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Winarno (2002:134) dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

- (1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberikan petunjuk untuk melakukan kebijakan.
- (2) Informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati peraturan tersebut atau tidak.

c. Wewenang

Menurut Agustino (2006:152) pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor

dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukan, dan memiliki wewenang melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Agustino, 2006:152).

3. Kecenderungan-kecenderungan (disposisi)

Jika para pelaksana bersikap baik (mendukung) terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan- pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

4. Struktur birokrasi

Menurut Winarno (2002:149) birokrasi merupakan badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaku kebijakan. Sistem birokrasi kadang kala memang sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintah, tetapi bisa juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang

lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu system birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

B. Konsep Kebijakan Publik

Sekarang ini istilah kebijakan publik sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Sebagaimana menurut Abdul Wahab (1997:3). Kebijakan lebih sering dikaitkan dengan tindakan dan perilaku negara atau pemerintah membuat sebuah keterkaitan yang akan dengan mudah dipahami bahwa kebijakan publik sering kali diberi makna sebagai tindakan politik.

Dalam buku berjudul “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara” oleh DR.M. Irfan Islamy (2002:7), *public policy* diartikan sebagai kebijaksanaan negara. Dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide-ide tentang arti kata *public policy*. Berikut ini ada beberapa pengertian dari *public policy*, dengan pendefinisian yang dikemukakan oleh para ahli yang kiranya dapat memberi penjelasan yang berguna bagi pemahaman dan pengetahuan kata *Public policy*, diantaranya adalah menurut Mustopadjaja (2003:5) *public policy* diartikan sebagai:

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Carl J. Friedrich (dalam Soenarko, 2000 : 42) mendefinisikan Public Policy sebagai berikut :

Public Policy is proposed course of action of a person, group, opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.

(kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut didalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Carl J. Friedrich itu, maka James E Anderson (Soenarko 2000:42) menyimpulkan suatu konsep public policy sebagai :

Public policy is a purposive course of action, followed by an actor or a set of actor in dealing with a problem or matter of concert.

(kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijaksanaan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam (Islamy, 2002:19) yang antara lain meliputi :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

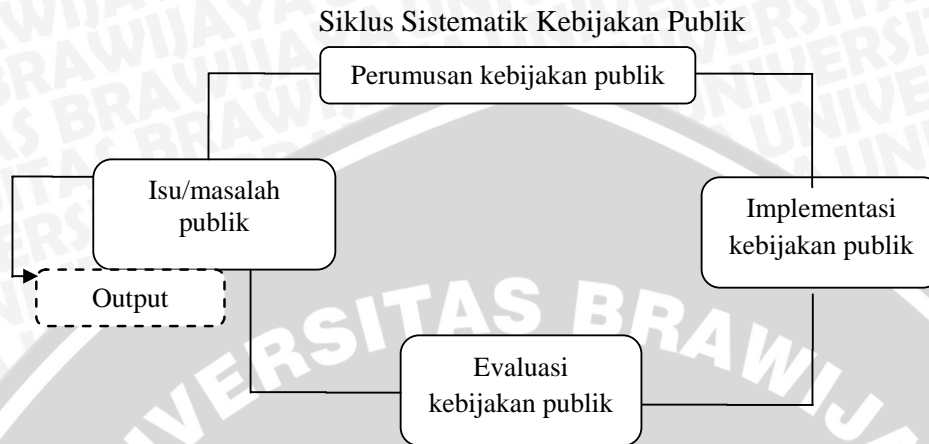
Sedangkan dalam konteks ilmu administrasi negara, konsep kebijakan selalu melekat dengan konsep kebijakan negara atau publik (public policy) karena kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik. Ini disebabkan karena kebijakan negara selalu mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak. Menurut David Easton dalam Wahab (1990 :15) Ciri-ciri khusus yang melekat dalam kebijaksanaan negara adalah bahwa kebijaksanaan negara itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut menurut Islamy (2002:20-21) adalah :

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana terkandung diatas, maka kebijakan dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah metodologis tentang bagaimana siklus dari kebijakan publik.

Bagan 2.



Sumber : Dwijowijoto (2003:73)

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan dalam keterangan berikut ini :

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai anggota politik untuk diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.

6. Didalam rangka jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

C. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

(1) Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut World Bank yaitu :

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

CSR adalah komitmen bisnis untuk kontribusi pengembangan ekonomi bekerja dengan karyawan dan representatif mereka, komunitas lokal dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dimana keduanya baik untuk bisnis dan pengembangan.

Menurut *World Council for Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk membangun dan pengembangan kontribusi ekonomi disamping meningkatkan kualitas kehidupan dalam dunia kerja dan keluarga mereka sebagai komunitas lokal dan masyarakat secara luas. (Wikipedia diakses pada tanggal 9 November 2010).

Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi:

International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

Canadian Government: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi,

dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

European Commission: Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.

(2) Arti Penting *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Wibisono (2007), Ada tiga alasan penting mengapa perusahaan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sejalan dengan operasi usahanya, yaitu:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif atau eksploratif.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Hal tersebut penting untuk mewujudkan harmonisasi hubungan dan erat kaitannya dengan citra dan performa perusahaan.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bisa akibat dari operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci:

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumberdaya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja;

Dalam arti sempit dipahami sebagai suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama antara pemegang saham dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam arti luas digunakan untuk mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders secara proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki dengan segera.

Dalam tataran praktis GCG yang dijadikan pedoman bagi pelaku bisnis, yaitu :

- Transparency (keterbukaan informasi)
- Accountability (akuntabilitas)
- Responsibility (tanggung jawab)
- Independency (kemandirian)
- Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat di tarik benang merah keterkaitan CSR dengan GCG. Penerapan prinsip responsibility tersebut , perusahaan memperhatikan kepentingan stakeholdernya sebagai bentuk konsekuensi dari operasional perusahaannya. Penerapan CSR adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep Good Corporate Governance (GCG).

2. *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak azasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Lesmana (2007) mengatakan bahwa *corporate social responsibility*

dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Pandangan lain tentang CSR yang lebih komprehensif, dinyatakan oleh *Prince of Wales International Business Forum*, yang di Indonesia dipromosikan oleh *Indonesia Business Links*. CSR menyangkut lima pilar, antara lain:

1. *Building human*; menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal (masyarakat). Perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*,
2. *Strengthening economies*; memberdayakan ekonomi komunitas,
3. *Assessing social cohesion*; maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik,
4. *Encouraging good governance*; perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik,
5. *Protecting the environment* ; perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan.

(3). Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Warhurst dalam Wibisono (2007:39) mengajukan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:

1. Prioritas Korporat. Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial,

2. Manajemen Terpadu. Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen,
3. Proses Perbaikan. Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional,
4. Pendidikan Karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan,
5. Pengkajian. Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik,
6. Produk dan Jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial,
7. Informasi Publik. Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, begitu pula dengan jasa,
8. Fasilitas dan Operasi. Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial,
9. Penelitian. Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif,
10. Prinsip Pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif,
11. Kontraktor dan Pemasok. Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok,
12. Siaga menghadapi darurat. Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali bahaya yang muncul.
13. *Transfer best practice*. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik,
14. Memberi sumbangan. Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial,
15. Keterbukaan. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potensial hazard, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa,
16. Pencapaian dan pelaporan. Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat

dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Menurut Wibisono (2007) Implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- (1) Terkait dengan komitmen pimpinannya. Perusahaan dengan pemimpin yang memiliki sensitifitas dan kepedulian sosial yang tinggi akan memiliki komitmen tinggi terhadap *Good corporate responsibility* (CSR), begitu pula sebaliknya.
- (2) Terkait dengan ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang besar dan stabil lebih berpotensi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- (3) Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan *shareholder*, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan *stakeholder* lainnya merupakan konsep utama CSR. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa dijadikan indikator atau perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR seringkali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum.

Lebih lanjut, Kasali (2005) membagi atas garis besar kriteria kepentingan dan keputusan serta kepuasan *stakeholders* terhadap keberadaan perusahaan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Interest Stakeholders terhadap Perusahaan

No.	Stakeholders	Kriteria Kepentingan dan Keputusan
1.	Shareholders	Financial Performance
2.	Employee	Salaries, Supervision dan Workforce a Satisfaction
3.	Consumers	Quality, Service, Location, Price
4.	Creditors	Creditworthiness
5.	Community	Community Contributions
6.	Supplier	Equal Transactions
7.	Government	Legal Compliance

Sumber: Kasali (2005)

Tabel diatas menunjukkan perbedaan karakter dan kepentingan stakeholders terhadap perusahaan, dimana mereka memiliki ukuran kepentingan secara berbeda-beda.

(4) Community Development Sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility

Praktik paling terkenal dari CSR adalah Community Development (Comdev), walau keduanya tidaklah dapat disamakan. *Community Development* didefinisikan sebagai upaya sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung, dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumberdaya yang dapat diaksesnya.

Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat (*community development*) adalah sebuah alternatif pembangunan yang merubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi partisipatif.

Menurut Friedman (1992), Karakteristik *Community Development* diartikan sebagai berikut:

The Empowerment approach places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory)democracy, and experiential social learning.

(pendekatan pemberdayaan menekankan pada otonomi dalam pembuatan keputusan dari wilayah organisasi masyarakat, kepercayaan diri daerah akan tetapi bukan negara dibawah otoriter, demokrasi dan pembelajaran pengalaman sosial).

Melalui pendekatan ini pengelolaan sumber daya produktif tidak dirancang dan dikelola secara terpusat melainkan oleh warga setempat sesuai dengan masalah, kebutuhan dan kondisi daerahnya. Prinsip dasarnya adalah kontrol atas suatu tindakan harus dipegang oleh mereka yang akan menanggung akibat tindakan tersebut.

Warhurst dalam Wibisono (2007:56) berpendapat, hubungan CSR dan masyarakat terwujud dalam empat hal utama, yaitu :

1. kontribusi pada pengembangan masyarakat (Comdev)
2. pengikutsertaan (pemrioritasan) kesempatan kerja dan usaha
3. pembiayaan sesuai kerangka legal
4. tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.

Tujuan *Community Development* Bertolak dari mandat konferensi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang telah dilakukan di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002, telah dicanangkan sektor energi dan sumber daya mineral perlu memperhatikan dampak-dampak yang berkenaan dengan pengolahan energi dan sumber daya mineral yang tidak terbarukan. Harus dicari alternatif berkelanjutannya agar masyarakat yang terkena dampak tersebut

dapat terus menerus mandiri tanpa bertopang pada sumber daya yang bersangkutan. Di dalam konteks tersebut, maka *community development* adalah salah satu instrumen pendukung yang berfungsi sebagai faktor transformasi menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

(5) Hubungan CSR dengan kesejahteraan

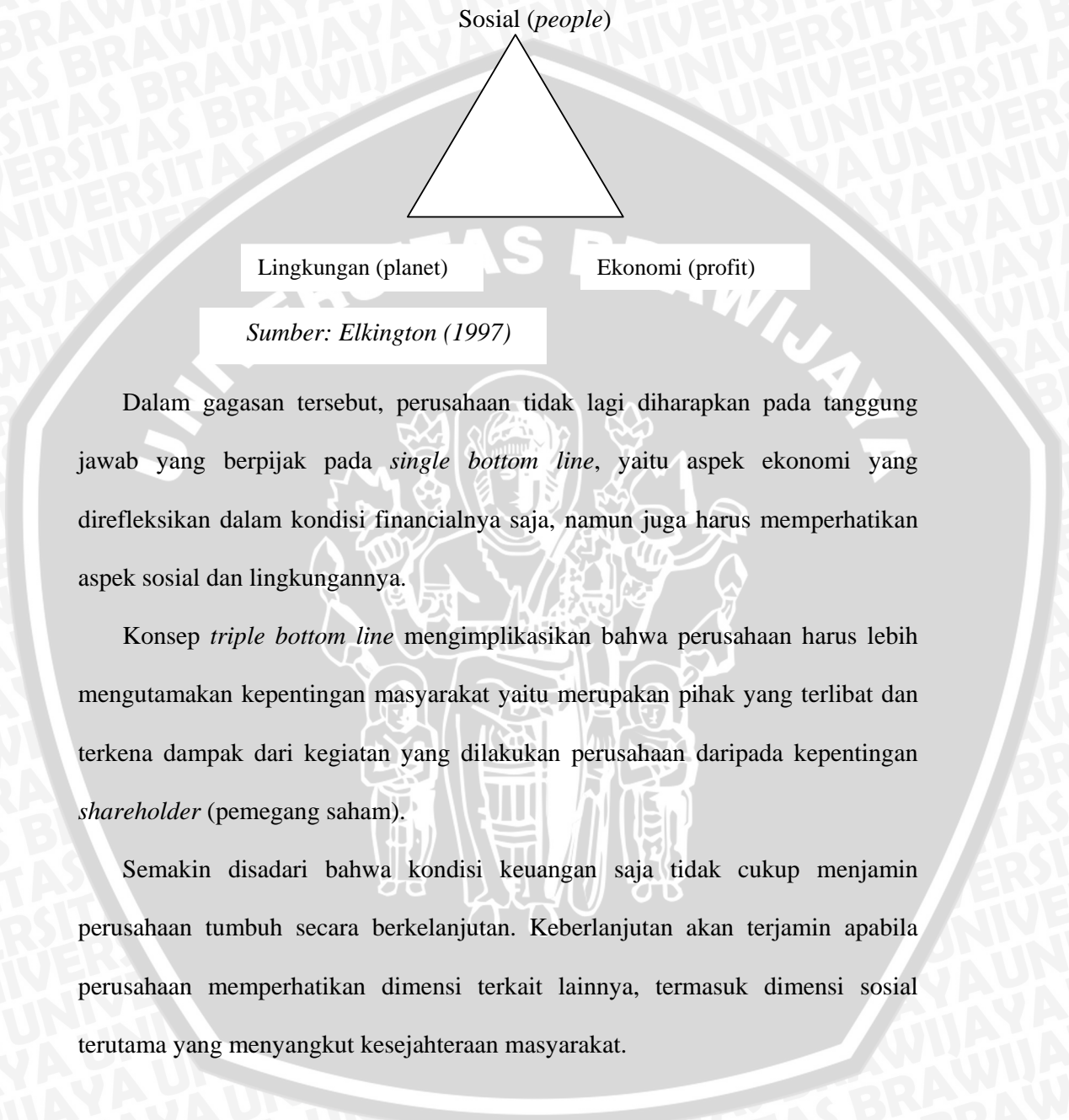
Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan diperkuat dengan adanya konsep-konsep dan teori di bawah ini, antara lain:

a. Konsep *Triple Bottom Line*

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipopulerkan oleh John Elkington, (1997) melalui bukunya *Cannibals With Forks: "The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business"*. Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*.

Melalui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan 3P. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut:

Gambar 3. Hubungan Garis Segitiga (*Triple Bottom Line*)



Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Konsep *triple bottom line* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu merupakan pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham).

Semakin disadari bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

b. Teori Michael Porter (*Competitive Advantage*)

Ahli manajemen dari Harvard Business School, Michael Porter, dalam tulisannya yang berjudul *Strategy and Society: The Link Between Competitive*

Advantage and Corporate Social Responsibility (Harvard Business Review, Desember 2006) telah melakukan riset dan mengemukakan bahwa konsep sosial harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Strategi perusahaan terkait erat dengan program tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak akan menghilangkan program tanggung jawab sosial itu meski dilanda krisis, kecuali ingin mengubah strateginya secara mendasar. Sementara pada kasus program tanggung jawab sosial pada umumnya, begitu perusahaan dilanda krisis, program tanggung jawab sosial akan dipotong lebih dahulu.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Porter, dapat ditarik garis besar bahwa terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholders*), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar.

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR yang merujuk pada teori Porter (*Competitive Advantage*), yaitu:

- a. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).

- c. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
- d. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

(6) Konteks Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hukum CSR di landasi oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat (3): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggrakan dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi tertuang dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adapun asas-asas dalam Undang-undang ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Asas ekonomi kerakyatan

Asas ekonomi kerakyatan, yaitu asas di mana di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi harus memberikan peluang yang sama kepada pelaku ekonomi.

2. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan di maksudkan agar setiap penyelenggaraan pertambnagan minyak dan gas bumi di lakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

3. Asas manfaat

Asas manfaat adalah suatu asas didalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memberikan manfaat/kegunaan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat banyak.

4. Asas keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam penyelenggaraan kegiatan itu harus

memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat. Oleh karena itu di dalam memberikan izin usaha hilir dan kontrak kerja sama harus terjadinya praktik monopoli, monoposni, oligopoli, dan oligopsoni.

5. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas di atas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana para pihak mempunyai kedudukan yang setara/sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

6. Asas pemertaan

Asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat dimiliki secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

7. Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak

yaitu asas didalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat memakmurkan (menjadi makmur) dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

8. Asas keamanan dan keselamatan,

yaitu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana di dalam penyelenggaraannya mampu memberikan rasa tentram, tidak ada gangguan dan aman bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau permintaan izin usaha hilir.

9. Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana di dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi mampu menjamin kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau yang menerima izin usaha hilir.

10. Asas berwawasan lingkungan

yakni asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memperhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Bahwasannya ExxonMobil Oil ini bekerja sama dengan BP-Migas yang bertindak sebagai BUMN. Oleh karena itu harus berpedoman pula pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.5 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Adapun bunyi Peraturan Menteri Negara BUMN No.5 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyatakan bahwa:

- (1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 8

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyatakan bahwa:

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen)
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program setelah di kurangi beban operasional
- c. Pelimpahan dana kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, jika ada.

(2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen).
- b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari program bina lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2006:4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode deskriptif menurut Nawawi dan Martini (1993:73) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.

Jadi disini peneliti ingin meneliti tentang analisis implementasi kebijakan *corporate social responsibility* terhadap kesejahteraan masyarakat secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

B. Fokus penelitian

Menurut Moleong (1991:62-63), ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan demikian fokus penelitian akan mempermudah peneliti mengambil serta mengolah data sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar rumusan masalah, tujuan, dan, manfaat penelitian yang dapat ditetapkan adalah:

1. Impelementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* ExxonMobil terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, meliputi:
 - a. Mekanisme pelaksanaan, Pola pelaksanaan dan keberlanjutan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
 - b. Output program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Peran Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip
3. Kendala-kendala dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, meliputi:
 - a. Komitmen ExxonMobil dengan Pemerintah daerah dan Masyarakat
 - b. Keterbatasan SDM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan letak penelitian yang akan dilakukan, dimana peneliti akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan kemudian mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Bojonegoro.

Situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya.

Adapun situs penelitian ini adalah:

1. Kantor Mobil Cepu Ltd, sebagai anak perusahaan ExxonMobil
2. Kantor Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip
4. LSM

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti melalui hasil penelitian yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Berupa hasil observasi dan wawancara dengan:

- a. Pegawai di Kantor Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 - Gambaran umum komitmen Pemerintah Kab.Bojonegoro dengan ExxonMobil dan Mobil Cepu Ltd.
 - Pola pengembangan sektor Migas di Kabupaten Bojonegoro
- b. Departemen Public and Government Affair ExxonMobil dan Field Public and Government Affair Manager Mobil Cepu Ltd.
 - Gambaran umum pola pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat
 - Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat
- c. Masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip
- d. LSM

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber tidak langsung, yaitu dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian ini berupa informasi mengenai implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam memperoleh datanya berasal dari dua sumber, yaitu sumber primer dan data sekunder yang terkait masalah-masalah implementasi. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya dilokasi penelitian atau obyek penelitian.

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diambil harus merupakan data yang valid yang diambil langsung dari sumbernya, untuk itu diperlukan tehknik pengumpulan data:

- Studi literatur

Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari hal-hal berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber pada:

1. Acuan Penelitian Terdahulu
 2. Kajian Teoritik
 3. Buku, surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan Tanya jawab yang disesuaikan dengan perkembangan interaksi sosial dengan anggota lingkungan sosial yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan:

1. Staf Pegawai Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 2. Departement Public and Government Affair ExxonMobil
 3. Field Public and Government Affair Manager Mobil Cepu Ltd.
 4. Masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip
 5. LSM
- Observasi

Teknik ini melakukan pengamatan dan penginderaan secara langsung terhadap keadaan dan perilaku yang akan diteliti dan data yang diperlukan dari proses observasi ini berupa seperangkat dokumentasi yang akan mempermudah dalam proses analisis implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

F. Instrumen Penelitian

Untuk menggali data yang dengan baik dan akurat maka dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan alat panca indera penulis sendiri untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peralatan penunjang atau pembantu selama melakukan penelitian, yaitu alat tulis menulis.

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide), yaitu berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk informan, yang berkaitan terhadap fenomena fokus penelitian.
3. Catatan Lapangan, pemusatan perhatian pada informasi yang berada dalam pengamatan langsung oleh peneliti yang tidak ditemukan dalam sumber data

G. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga analisis data bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dari sebuah fenomena. Menurut *Miles* dan *Huberman*, analisis data mencakup langkah-langkah:

1. Pengumpulan data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian dari angka. Data yang telah dikumpulkan dengan macam cara yaitu melalui proses pengamatan, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan dan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan dan berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud adalah informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif.

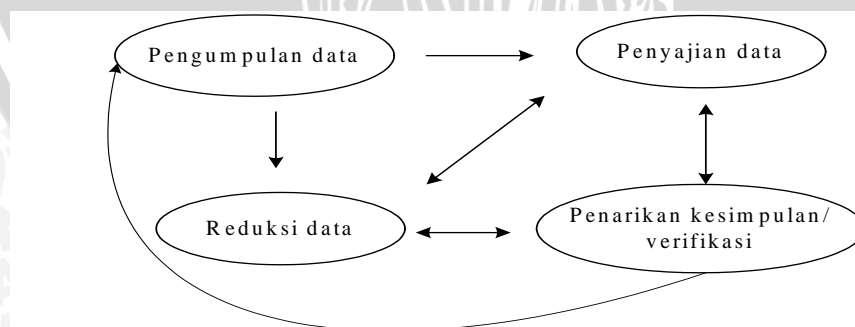
4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Berikut ini adalah alur penarikan kesimpulan yang dimaksud:

Gambar 4.

Alur Penarikan Kesimpulan menurut *Miles dan Huberman*



Sumber: *Miles dan Huberman (1992:20)*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Obyek Penelitian

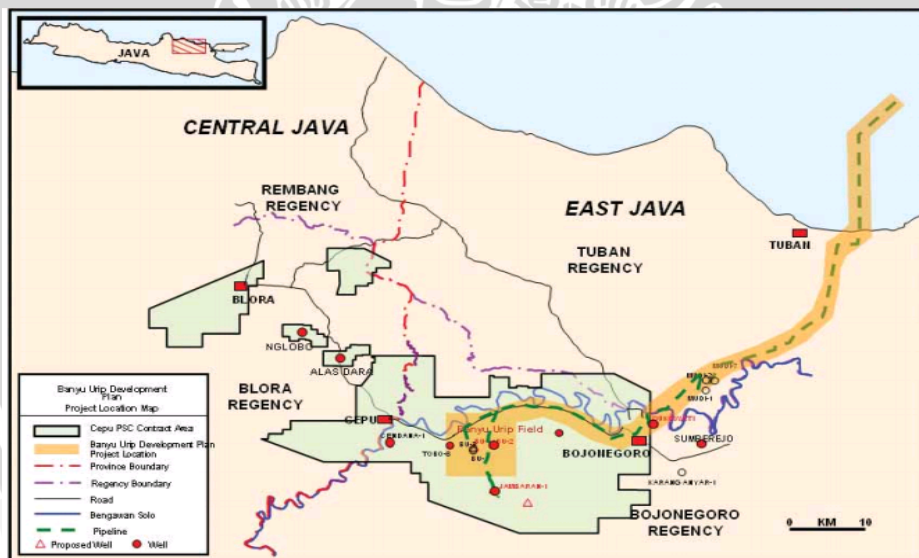
Kabupaten Bojonegoro secara administratif adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak \pm 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi $6^{\circ}59'$ sampai dengan $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}25'$ sampai dengan $112^{\circ}09'$ Bujur Timur. (sumber dari www.bojonegoro.go.id)

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). (sumber dari www.bojonegoro.go.id)

Sedangkan Nama Blok Cepu merupakan sebutan untuk memudahkan pengaplingan sebuah area peta geologi. Meski menggunakan nama tersebut yang seolah memberikan konotasi blok ini masuk wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, namun sebagian besar kandungan migasnya

berada di Kabupaten Bojonegoro, persisnya di Kecamatan Ngasem. Blok Cepu ini luasnya 1.670 km² dan terdiri dari 8 wilayah peta geologi yaitu Banyu Urip, Sukowati, Jambaran, Alas Tua Barat, Alas tua timur, Kemuning, Cendana dan Kedung Keris. Kedelapan lokasi sumur ini berada di 2 Propinsi yaitu Cepu, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah CSR pada masyarakat yang berada di wilayah sumur minyak Banyu Urip, yang terdiri dari beberapa desa Kecamatan Ngasem dan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini merupakan peta wilayah Blok Cepu :

Gambar 5.
Peta wilayah Blok Cepu



Sumber : Kantor Bag.SDA Kab.Bojonegoro

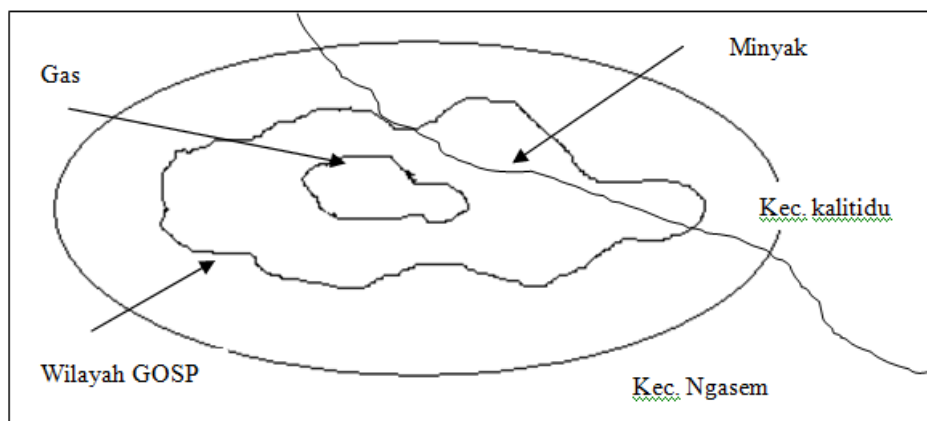
b. Proyek Wilayah Sumur Minyak Banyu Urip

Proyek Banyu Urip merupakan pengembangan lapangan pertama di Wilayah Kontrak Cepu dan melibatkan pengembangan lapangan minyak

Banyu Urip. Penemuan Lapangan Banyu Urip diumumkan pada April 2001 dan diperkirakan mengandung 375 juta barrel minyak. Pada produksi puncaknya, Banyu Urip diharapkan akan menghasilkan sebanyak 165 ribu barrel minyak per hari. Wilayah Banyu Urip ini meliputi 2 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Ngasem dan Kalitidu.

Berikut ini adalah peta daerah sumur minyak Banyu Urip :
Gambar 6.

Peta Sumur Minyak Banyu Urip



Sumber : Kantor Bagian SDA Kab. Bojonegoro, Tahun 2011

Peta tersebut diatas menggambarkan keadaan di sekitar wilayah sumur minyak Banyu Urip yang terletak di Kecamatan Ngasem dan Kecamatan kalitidu. Sedangkan lingkaran di sekitar sumur minyak Banyu Urip adalah biasa disebut dengan wilayah GOSP (Gas Oil Separation Plant), yaitu merupakan wilayah terdekat dari sumur minyak tersebut.

Proyek Banyu Urip adalah proyek pertama yang dikembangkan pada masa setelah penandatanganan KKS, yang termasuk didalamnya pengembangan lapangan minyak Banyu Urip. Produksi minyak awal dalam jumlah terbatas dari Lapangan Banyu Urip telah di mulai pada bulan

Desember 2008. Early Production Facility (EPF) dengan kapasitas produksi hingga 20.000 barrel minyak per hari di mulai pada bulan agustus 2009.

2. Sejarah dan Gambaran Umum ExxonMobil Oil Indonesia

ExxonMobil merupakan perusahaan minyak bumi dan gas alam terpadu terbesar di dunia. Perusahaan dan afiliasi-afiliasi ExxonMobil hadir pada skala global dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas dan memasarkan produk-produk di seluruh dunia serta mengeksplorasi minyak dan gas alam di enam benua. ExxonMobil menjadi pemimpin industri hampir dalam setiap aspek bisnis energi dan petrokimia.

Anak perusahaan Exxon Mobil Corporation berbisnis hampir 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jangkauan bisnis hulu ExxonMobil mencakup di hampir 40 negara dan merupakan produsen migas swasta terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri ExxonMobil memiliki pengalaman selama lebih dari dunia.

Dibawah naungan Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP-Migas) oleh pemerintah Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMOI) melakukan seluruh kegiatan eksplorasi dan produksinya. EMOI mengoperasikan lapangan Arun di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) bagi BP-MIGAS, Lembaga Otorita Minyak dan Gas Hulu Indonesia. Afiliasi EMOI juga mengoperasikan Lhoksukon Selatan A dan D, lapangan gas *onshore* Pase A dan B serta lapangan gas lepas pantai Sumatera Utara (NSO). Afiliasi EMOI, Esso

Natuna Limited dan Mobil Natuna D-Alpha Inc. bersama-sama dengan Pertamina, melanjutkan tugasnya untuk mengamankan pasar bagi pemasaran gas dari Lapangan Natuna (D-Alpha) di Laut Cina Selatan. Pada Tahun 2006 dan 2007, EMOI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk wilayah kerja Blok Surumana dan Blok Mandar yang terletak di Selat Makassar.

Sedangkan Kontrak Kerja Sama (KKS) Cepu ditandatangani 17 September 2005, mencakup wilayah kontrak Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mobil Cepu Ltd. (MCL), Ampolex Cepu Pte Ltd., PT Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah: PT Sarana Patra Hulu Cepu (Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Blora) dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (Jawa Timur) yang tergabung menjadi kontraktor di bawah KKS Cepu. ExxonMobil memegang 45 persen dari total saham partisipasi Blok Cepu. KKS Cepu ini akan berlanjut hingga 2035 dan Mobil Cepu Ltd. sebagai Operator lapangan Blok Cepu.

3. Prinsip Kerja ExxonMobil

(1) Kewargaan Korporat ExxonMobil (Standar Operasional Perusahaan)

Kewargaan korporat adalah bagian utama dari perencanaan bisnis ExxonMobil. Tanggung jawab utama adalah untuk turut serta usaha memenuhi kebutuhan energi dunia dengan mengutamakan unsur nilai ekonomi, kondisi lingkungan, serta kondisi sosial. Namun lebih dari itu,

juga memiliki komitmen untuk bekerja dengan standar etik yang tinggi serta tetap menjunjung tinggi budaya lokal dan nasional serta turut ambil bagian dalam membantu pengembangan kapasitas lokal. Semuanya itu berjalan seiring dengan komitmen untuk senantiasa menjalankan kegiatan

Nilai-nilai tersebut menjadi semangat utama dalam kehidupan ExxonMobil. Nilai-nilai bukan hanya untuk diucapkan, namun akan dilakukan. ExxonMobil memahami bahwa penilaian dari masyarakat bukan dari apa yang dikatakan, namun dari apa yang dilakukan. Maka dari itu, kualitas yang tinggi dari manajemen dan karyawan perusahaan adalah kekuatan utama dari ExxonMobil.

(2) **Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan**

Proyek Banyu Urip memiliki program Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan – Safety, Health, and Environment (SHE), yang bertujuan untuk menjamin keselamatan kerja dan permukiman, serta memastikan bahwa dampak dari proyek ini tetap sesuai dalam batasan serta tidak melanggar peraturan dan hukum di Indonesia.

Beberapa aspek dari program manajemen SHE ini adalah : meminimalkan pembakaran gas buang, sistem pengolahan air, pencegahan tumpahan minyak, pengelolaan limbah dan penghijauan.

Demikian pula dalam hal pengadaan tanah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku khususnya mengenai keselamatan dan efisiensi kerja proyek.

Pada bulan Desember 2004, dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diselesaikan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dokumen AMDAL tersebut disusun dengan segala pertimbangan serta masukan dari masyarakat lokal serta dengan studi mendalam mengenai kondisi lingkungan.

4. Community Engagement ExxonMobil (Standart Operasional Perusahaan)

Community Engagement merupakan komitmen perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik terhadap karyawan dan masyarakat, disamping melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, ExxonMobil berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat dengan membuat kebijakan keselamatan dan pengembangan masyarakat.

Kebijakan keselamatan merupakan kebijakan ExxonMobil untuk :

1. Merancang dan memelihara fasilitas operasi, menetapkan sistim manajemen, mengadakan pelatihan dan melakukan kegiatan operasional menurut cara-cara yang aman bagi manusia dan fasilitas;
2. Menanggapi secara cepat, efektif, dan memberikan bantuan darurat saat terjadi kecelakaan yang timbul dari kegiatan operasional, bekerjasama dengan organisasi industri dan lembaga pemerintah yang berwenang;

3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku, dan menerapkan standar-standar yang bertanggungjawab dan memadai saat tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya;
4. Menjalini kerja sama dengan lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengembangkan undang-undang, peraturan serta standar berdasarkan pada pertimbangan pengetahuan serta resiko;
5. Menjalankan dan mendukung riset untuk memperluas pengetahuan mengenai efek keselamatan dari suatu kegiatan operasional, serta segera menerapkan temuan-temuan yang didapat dan, bila dianggap perlu, memberitahukannya kepada karyawan, kontraktor, lembaga pemerintah serta pihak-pihak lain yang mungkin akan terkena dampaknya;
6. Menekankan kepada seluruh karyawan, kontraktor, serta pihak-pihak lainnya yang bekerja mengenai tanggung jawab serta akuntabilitas mereka dalam menjaga kinerja saat bekerja serta mencontohkan perilaku yang aman saat tidak bekerja;
7. Melakukan kaji ulang dan evaluasi yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional untuk mengukur progres pekerjaan serta untuk mempromosikan ketaatan terhadap kebijakan ini.

ExxonMobil yakin dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman akan dapat memberikan kinerja yang baik termasuk di semua aspek lain di bisnis ini. Dengan bantuan teknologi baru, akan terus berupaya membuat kegiatan operasional lebih aman, sehat dan ramah lingkungan. Di

ExxonMobil, kesempurnaan dalam masalah keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan merupakan unsur inti yang diutamakan.

Pengembangan Masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip diserahkan sepenuhnya kepada Mobil Cepu Ltd., memiliki komitmen pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar daerah operasi serta dimana karyawan Mobil Cepu Ltd tinggal dan bekerja. Komitmen tersebut termasuk kontribusi korporat dan program kerja bakti sukarela karyawan yang dilaksanakan diseluruh dunia.

Dengan komitmen yang tinggi bagi masa depan Indonesia, Mobil Cepu Ltd. secara terus menerus berusaha untuk menjadi bagian yang bertanggung jawab bagi masyarakat dimana MCL mengembangkan sumber daya alam yang penting.

5. Kegiatan Usaha ExxonMobil di Sumur Minyak Banyu Urip

Produksi minyak awal dalam jumlah terbatas dari Lapangan Banyu Urip telah di mulai pada bulan Desember 2008. Early Production Facility (EPF) dengan kapasitas produksi hingga 20.000 barel minyak per hari di mulai pada bulan Agustus 2009.

Pengembangan penuh lapangan Banyu Urip terdiri dari Fasilitas Pusat Pengolahan (Central Processing Facility/CPF), jalur pipa darat dan lepas pantai serta fasilitas penyimpanan dan alir-muat terapung (Floating Storage and Offloading/FSO). CPF, yang terletak 10 km sebelah tenggara Cepu dan 20 km barat daya Bojonegoro di tengah lapangan minyak, akan memproses dan mengolah minyak mentah yang di produksi. Minyak yang telah diolah

disalurkan dengan sarana jaringan pipa minyak berinsulasi dengan diameter 20 inchi yang tertanam di bawah tanah hingga pantai Tuban, yang kemudian disalurkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas FSO. Kapal tanker kemudian akan memuat minyak mentah dari FSO untuk di kirimkan ke pasar domestik dan dunia.

Pengelolaan minyak bumi dari lapangan Banyu Urip akan dimaksimalkan dengan mengebor sumur-sumur injeksi air untuk membantu menjaga tekanan pada reservoir dan mendorong minyak menuju sumur produksi. Injeksi air di pasok dari air terproduksi dan juga memanfaatkan luapan air Bengawan Solo pada musim hujan. Gas alam yang dihasilkan bersama minyak mentah akan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi CPF. Proyek ini terus melanjutkan proses pembebasan lahan dan melakukan kegiatan lelang kontrak pekerjaan untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan sampai tahun 2035.

6. Misi dan Tujuan CSR ExxonMobil

Misi

- a. Mengimplementasikan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder dalam upaya mendukung kemajuan perusahaan.
- b. Mewujudkan kepedulian sosial ExxonMobil dan kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat secara berkelanjutan

Tujuan

- a. Memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diatur oleh UU No.40 Tahun 2007

- b. Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan
- c. Memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial
- d. Meningkatkan nilai dan budaya perusahaan yang terintegasi dengan strategi bisnis perusahaan
- e. Bagian dari upaya membangun citra perusahaan

7. Pedoman Kegiatan CSR ExxonMobil

Prioritas

- a. Difokuskan pada kegiatan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan diluar butir 1 diatas tetap dilakukan sesuai dengan program Korporat dan Daerah Unit Operasi

Kriteria Kegiatan CSR ExxonMobil

- a. Kebutuhan Masyarakat
Kegiatan CSR ExxonMobil disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih luas
- b. Inovasi dan Spesifik
Kegiatan ditujukan sesuai dengan isu sosial yang spesifik dan dilakukan dengan pendekatan yang inovatif
- c. Potensial
Dalam jangka panjang, secara potensial akan dapat mengatasi isu-isu sosial
- d. Strategis

Kegiatan secara strategis ditujukan untuk mengantisipasi masalah sosial dan akan mempertegas pencapaian tujuan

e. Kemitraan

Perencanaan program serta implementasinya dapat bermitra dengan pemerintah, LSM dan perguruan tinggi.

2. Data Fokus Penelitian

(1). Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

ExxonMobil Terhadap masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip

Pelaksanaan CSR ExxonMobil diserahkan sepenuhnya oleh anak perusahaannya yaitu Mobil Cepu Ltd. Peran Mobil Cepu Ltd adalah operator lapangan dari Blok Cepu sekaligus sebagai pihak penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan CSR oleh Mobil Cepu Ltd mulai dilaksanakan pada Tahun 2006, sebagai bagian dari masyarakat, ExxonMobil menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak terlepas dari kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang sejahtera, terutama daerah sekitar sumur minyak di Banyu Urip akan mendukung pertumbuhan bisnis ExxonMobil.

Berikut ini merupakan Tabel Pendapatan ExxonMobil setiap tahunnya dalam *Million of Dollars* (Juta Dolar), sebagai dana awal ExxonMobil melalui pelaksanaan CSR yang diserahkan kepada Mobil Cepu Ltd :

Tabel 2.**Tabel Pendapatan ExxonMobil Corporation (Juta Dollar)**

No.	Pendapatan	2008	2009	2010
1.	Sales and other operating revenue	459,579	301,500	370,125
2.	ExxonMobil share of equity at year end	112,965	110,569	146,839
3.	Pendapatan Bersih (Net Income)	45,220	19,280	30,460

Sumber : 2010 Summary Annual Report, ExxonMobil Corporation

Tabel 3.**Tabel Rincian Dana CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd :**

No.	Tahun	Dana yang dialokasikan
1.	2006-2008	21 Milyar
2.	2009-2010	21 Milyar

Sumber : 2010 Summary Annual Report, Mobil Cepu Ltd

Berikut ini merupakan sasaran program CSR, yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd.. :

Tabel 4.
Sasaran Program CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil
Cepu Ltd:

No	Sasaran	Program	Stakeholder terkait
1.	Bidang Pendidikan	a. Perbaikan fasilitas pendidikan b. Peningkatan kualitas pengajaran c. Pelatihan Kualitas Pembelajaran d. Peningkatan kualitas layanan informasi bidang pendidikan	Mobil Cepu Ltd, Dinas Pendidikan, Kantor Arsip dan Kepustakaan Daerah, Pekerja Lokal, LSM
2.	Bidang Kesehatan	a. Perbaikan fasilitas kesehatan b. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan c. Pelatihan Kualitas manajemen Pelayanan kesehatan d. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Mobil Cepu Ltd, Dinas Kesehatan, Swadaya Masyarakat, LSM
3.	Pengembangan Ekonomi	a. Program pemberdayaan masyarakat b. Pendirian Perkreditan Rakyat untuk Kredit Usaha Kecil c. Pelatihan peningkatan keterampilan di bidang wirausaha d. Peningkatan kualitas jalan poros desa	Mobil Cepu Ltd, masyarakat dan LSM

Sumber : Mobil Cepu Ltd., 2011

Berikut ini merupakan prosentase pertumbuhan ekonomi Tahun 2008-2010 :

Tabel 5.
Prosentase Pertumbuhan Ekonomi

No.	Tahun	Tanpa Migas (dalam %)	Dengan Migas (dalam %)
1.	2008	5,82 %	12,43 %
2.	2009	5,93 %	10,44 %
3.	B 2010	6,26 %	12,54 %

Sumber : Kantor Bag.SDA Kabupaten Bojonegoro

1. Kesejahteraan Masyarakat Meningkat / Jumlah Penduduk Miskin Berkurang, berikut ini merupakan hasil prosentase tingkat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat :

Tabel 6.
Prosentase Pertumbuhan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Lapangan Usaha Tenaga Kerja	Nilai Tukar Petani
1.	2008/2009	128.981 RTM	-Unit Usaha Besar : 7.160 -Unit Usaha Kecil : 34.441	98,74 %
2.	2009/2010	101.547 RTM	-Unit Usaha Besar : 7.941 -Unit Usaha Kecil : 39.273	102,45%

Sumber : Kantor Bag.SDA Kabupaten Bojonegoro

(a). Mekanisme, Pola pelaksanaan dan Keberlanjutan program CSR

Mobil Cepu Ltd, sebagai anak perusahaan ExxonMobil Oil yang merupakan operator utama Blok Cepu berperan sebagai pelaku utama dari

pelaksanaan CSR ini, akan tetapi program yang akan dilaksanakan merupakan hasil persetujuan dari BP-Migas maupun ExxonMobil.

Mekanisme dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dimulai dengan usulan masyarakat, pola pelaksanaannya dilaksanakan dengan sistem swadaya masyarakat.

Seperti yang diutarakan oleh Communication Coordinator Mobil Cepu Ltd, Bpk. Ichwan Arifin, menuturkan:

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Karena itu, setiap program yang kita laksanakan senantiasa melibatkan masyarakat langsung. Karena kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi obyek, melainkan menjadi subyek. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2011, jam 14.15 di Kantor Mobil Cepu Ltd.)

Hal ini juga sependapat dengan Bpk. Arnasz Setiawan, Kasubag Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, menuturkan:

Meski Belum maksimal Mobil Cepu Ltd. sudah memberikan perkembangan kepada desa sekitar sumur minyak Banyu Urip. Selama ini pemerintah daerah dengan Mobil Cepu Ltd. dan di damping oleh LSM, selalu berusaha untuk melibatkan rekanan, masyarakat dan pekerja lokal dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang mendasari kekurangan pelaksanaan CSR akan dirumuskan dalam aturan khusus semacam perda untuk mengutamakan lembaga dan masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan CSR, dan selama ini yang tercatat dalam kegiatan CSR Mobil Cepu Ltd. adalah 4 LSM lokal. (Wawancara tanggal 15 Februari 2011, jam 14.00 di Kantor Bag. Sumber Daya Alam Kab. Bojonegoro)

Akan tetapi didalam pelaksanaan CSR ini LSM lokal dari Kabupaten Bojonegoro yang ikut berpartisipasi hanyalah beberapa saja. Dari sumber Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Bojonegoro, saat ini tercatat 4 LSM yang ikut mengelola program pemberdayaan masyarakat.

(b). Output program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd.

Program CSR ExxonMobil yang di delegasikan kepada Mobil Cepu Ltd selaku anak perusahaan sekaligus operator lapangan Blok Cepu, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, dengan di dampingi oleh LSM sebagai pihak pembantu dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Bpk.Mugito Citrapati, Tokoh Masyarakat Banyu Urip (Pemimpin redaksi suara Banyu Urip), menuturkan bahwa :

Ganti rugi lahan sudah diberikan oleh Mobil Cepu Ltd, kami gunakan untuk wirausaha dan sebagian kami tabung. Sampai sekarang tanah yang dipakai oleh Mobil Cepu Ltd untuk kegiatan usaha sudah dilunasi dan dulu tuntutan dari masyarakat untuk melunasi tanah sudah beres, dari 400 Ha yang belum mendapatkan ganti rugi sekitar 50-70 Ha. Itu juga disebabkan oleh berkas-berkas si pemilik lahan yang belum lengkap, sehingga MCL tidak bisa memberikan ganti rugi sebelum berkas itu memenuhi syarat. Mekanisme ganti rugi lahan dengan mengirim langsung uang melalui rekening pemilik lahan. (wawancara pada tanggal 13 April 2011, jam 11.00 di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro)

Masalah ganti rugi lahan dan permasalahan mengenai dampak lingkungan sudah dipenuhi oleh Mobil Cepu Ltd, misalnya saja dalam masalah sanitasi air warga sekitar sumur minyak Banyu Urip, tujuan perusahaan adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam masalah lingkungan di sektor kesehatan, terutama kebutuhan air bersih dengan memberikan sanitasi air.

Hal ini sependapat dengan pernyataan Communication Coordinator Mobil Cepu Ltd, Bpk. Ichwan Arifin, menuturkan bahwa :

Komitmen kami selain untuk membantu pemerintah dalam pembangunan yaitu dengan memenuhi tanggung jawab kami dalam masalah ganti rugi lahan dan masalah dampak lingkungan, kita menjaga hubungan baik kita dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan, kita juga meminimalisir masalah kerusakan lingkungan. Apabila terjadi permasalahan itu, kembali lagi kepada komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tanggungjawab untuk menjaga lingkungan, kami juga meminta dukungan masyarakat dan pemkab dalam hal ini. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2011, jam 14.15 di Kantor Mobil Cepu Ltd)

Tanggungjawab Mobil Cepu Ltd untuk mensejahterakan masyarakat difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, adapun rincian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mobil Cepu Ltd yang sudah terlaksana mulai tahun 2006-2011 meliputi :

1. Perbaikan fasilitas pendidikan, antara lain :
 - a. Perbaikan fasilitas pendidikan yang dilaksanakan di 12 Sekolah Dasar dan 21 TK Semai Benih bangsa di Desa Begadon, Ringintunggal, Beged, Gayam, Bandungrejo, Gayam, Kalitidu, Katur, Kolong, Mayanggeneng, Ngadiluwih, Ngringinrejo, Setren, Sudu, Sumengko, Ngasem, Bonorejo, Brabowan, Mojodelik, Trenggulun, Wadang dan Ngraho.
 - b. Pelatihan Penyegar Guru TK
 - c. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengajaran untuk Guru SD, SMP dan SMA Pelatihan

- d. Peningkatan Kualitas Pengajaran Bahasa Inggris untuk Guru SMA/SMK
 - e. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Fasilitas untuk Sekolah Menengah Kejuruan
 - f. Pelatihan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas Melalui Teknologi Informasi Komunikasi
 - g. *Native Speaker* Program
 - h. Perpustakaan Keliling
 - i. Program Mobil layanan informasi
2. Perbaiki Fasilitas Kesehatan, antara lain :
- a. MCL melakukan peremajaan terhadap alat-alat kesehatan di 12 Polindes yang terletak di Kecamatan Dander, Ngasem, dan Kalitidu dan juga melakukan pembangunan Polindes yang terletak di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Pelatihan Kesadaran Sanitasi Lingkungan
 - c. Pelatihan Manajemen Pelayanan dan Peningkatan Fasilitas Puskesmas
 - d. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
 - e. Pelatihan Peningkatan kualitas dasar kesehatan masyarakat
 - f. Bantuan sepeda motor sampah, sebagai sarana penunjang operasional Pemerintah Daerah terhadap upaya penataan lingkungan dan kebersihan di Bojonegoro.
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Bojonegoro

- a. Sebagai langkah awal, telah dilakukan penguatan kelembagaan terhadap paguyuban ternak dan petani di 15 desa sekitar lokasi *Central Processing Facilities* (CPF) di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu yang kemudian dilanjutkan kepada pembangunan Kandang Belajar Sapi Rakyat (KBSR) di Desa Brabowan.
- b. Pendirian Perkreditan Rakyat untuk Kredit Usaha Kecil
- c. Koperasi Jasa Keuangan dan Penataan Pedagang Kaki Lama
- d. Pelatihan Manajemen Baru bagi Wirausahawan Baru dengan cara memberikan pelatihan peningkatan ketrampilan
- e. Pelatihan Ketrampilan Teknik Industri Migas
- f. Program peningkatan kualitas jalan poros desa

(2). Peran CSR ExxonMobil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

a. Gambaran Umum wilayah Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Sebelum adanya CSR

Banyu Urip merupakan nama daerah penghasil minyak, tepatnya disebut dengan sumur minyak, penamaan tersebut berdasarkan peta geologi. Terletak di Desa Gayam Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dan berdekatan dengan Kecamatan Kalitidu. Potret perekonomian di daerah ini, banyak terdapat masyarakat miskin maupun berpenghasilan rendah, sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi penduduk daerah Banyu Urip.

Gambar. 7
Kondisi Sosial masyarakat Banyu Urip



Sumber : Kantor Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro

Demikian pula dengan Kabupaten Bojonegoro yang tergolong sebagai 5 Kabupaten miskin di Jawa Timur. Ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di setiap bagian wilayah di Kabupaten Bojonegoro mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini, hal ini didukung dengan adanya potensi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sumber minyak dan Gas bumi melimpah sehingga pembangunan yang berkembang pesat sangat diharapkan demi kesejahteraan bersama.

b. Gambaran Umum daerah Banyu Urip Setelah adanya CSR

Pemerintah meminta komitmen swasta secara khusus sebagai wujud pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan. CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama stakeholder terkait, terutama adalah masyarakat disekeliling dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sudarminto, warga Desa Bonorejo Kecamatan Ngasem yang berdekatan dengan sumur minyak Banyu Urip, menuturkan :

Jalan poros desa sekarang sudah mulus karena dipaving, dan jalan utama sudah diaspal. Gedung-gedung sekolah juga banyak yang dibangun MCL. Semakin ada peningkatan yang bisa dilihat hasilnya. Pembangunan jalan yang bagus memudahkan kita dalam bekerja dan kita sangat merasakan manfaatnya. Tapi kita berharap agar pembangunan yang diberikan untuk kita (warga sekitar sumur minyak Banyu Urip) lebih banyak lagi, tidak hanya ini saja lah.. (wawancara tanggal 19 Februari 2011, jam 09.00 di Desa Bonorejo)

Implementasi dari serangkaian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara keseluruhan dengan kisaran dana untuk menyelenggarakan program pemberdayaan mulai tahun 2006-2008 di perkirakan mencapai 21 Milyar dan di tahun 2008-2010 mencapai 22 Milyar.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kasubag Penataan dan Konservasi Bag. Sumber Daya Alam Kab. Bojonegoro, Bpk. Arnasz Setiawan, menuturkan :

Kalkulasi dana untuk kegiatan CSR mulai tahun 2006-2008 di perkirakan mencapai 21 Milyar dan di tahun 2008-2010 menacapai 22 Milayr, sedangkan laporan keuangan yang akan dilaporkan pada kita baru mulai disusun dalam laporan agenda resmi pada pertengahan tahun 2011, sekarang ini masih dalam proses. (Wawancara pada tanggal 13 April 2011, jam 14.00 di Kantor Bag.SDA, Kabupaten Bojonegoro)

Pendapatan Mobil Cepu Ltd sementara ini masih dalam tahap produksi awal yaitu 22.000 barel per hari.

Hal ini dibenarkan oleh Communication Coordinator Mobil Cepu Ltd, Bpk. Ichwan Arifin, menuturkan bahwa:

Sekarang ini perkembangan produksi Mobil Cepu Ltd, dalam tahap EPF (Early Production Facility) atau masih dalam tahap produksi awal. Dengan produksi 22.000 barel per hari untuk lapangan Banyu Urip, pembeli awal dari minyak hasil dari Banyu Urip dibeli oleh Pertamina dan Tri Wahana Universal (TWU). (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2011, jam 14.15 di Kantor Mobil Cepu Ltd)

Pernyataan juga sesuai dengan pendapat Field Public and Government Affair Manager Mobil Cepu Ltd, Bpk. Rexy Mawardijaya, menuturkan bahwa :

Saat ini kita masih dalam tahap produksi awal, 20.000 barrel per hari dana akan mencapai puncaknya pada tahun 2012, yakni 160.000 barrel per hari. Sehingga dana CSR yang digunakan dalam bentuk investasi awal ExxonMobil, nanti kalau sudah dalam produksi puncak, perusahaan akan mulai menghitung kewajiban untuk CSR sesuai dengan ketentuan Undang-undang. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd)

Berikut ini merupakan rincian dana yang seharusnya dialokasikan oleh ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd, diukur sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 :

Tabel 7.

Tabel Dana CSR yang harus dialokasikan sesuai dengan PerMen BUMN No.5 Tahun 2007 adalah (Dalam Juta Dollar) :

N o.	Tahun	2% dari Pendapatan Bersih	Dalam Rupiah (1USD = Rp.8000)
1.	2008	9,044 (<i>Juta Dollar</i>)	487,36 M
2.	2009	3,865 (<i>Juta Dollar</i>)	309,2 M
3.	2010	6,092 (<i>Juta Dollar</i>)	487,36 M

Sumber : Data Primer yang Diolah.

Tabel 8.

Tabel Perhitungan Dana CSR ExxonMobil diukur sesuai dengan PerMen BUMN No.5 Tahun 2007 :

No.	Tahun	Dana yang dialokasikan	Yang sudah terlaksana sesuai dengan PerMen BUMN (prosentase)
1.	2006-2008	21 Milyar	1,2 %
2.	2009-2010	21 Milyar	1,3 %

Sumber : Data Primer yang Diolah

Peran CSR Mobil Cepu Ltd Dalam Bidang Pendidikan

1. Perbaikan fasilitas pendidikan, yaitu :

Bertujuan untuk menunjang kegiatan peningkatan kapasitas tenaga ajar guru TK/pra sekolah dan sekolah dasar di sekolah-sekolah yang terletak di sekitar *Central Processing Facilities (CPF)* dan *Early Production Facility (EPF)*.

Berikut ini merupakan gambar gedung sekolah yang mendapatkan bantuan program pembangunan :

Gambar 8. Renovasi Gedung Sekolah



Sumber : Hasil Penelitian

Dilaksanakan di 12 Sekolah Dasar dan 16 TK Semai Benih Bangsa di Desa Begadon, Ringintunggal, Beged, Gayam, Bandungrejo, Gayam, Kalitidu, Katur, Kolong, Mayanggeneng, Ngadiluwih, Ngringinrejo, Setren, Sudu, Sumengko, Ngasem, Bonorejo, Brabowan, dan Mojodelik.

2. Pelatihan Ketrampilan Teknik Industri Migas

Hingga tahun 2010, lebih dari 600 peserta usia produktif (18-30 tahun) yang berasal dari desa-desa di sekitar *Central Processing Facility* (CPF), jalur pipa (ROW), dan daerah eksplorasi telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusdiklat Migas, Cepu dan UPT BLK Bojonegoro ini.

3. Pelatihan Penyegar Guru TK

Sejak tahun 2006, MCL telah membina 35 Taman Kanak-kanak Semai Benih Bangsa (SBB) yang terletak di Kecamatan Kalitidu dan Ngasem. Untuk mendukung keberlanjutan pembinaan, pelatihan penyegar (*refresher training*) dimaksudkan untuk menjaga kualitas pendidikan anak usia dini yang tergabung dalam TK SBB.

Sebanyak 70 guru dan 27 orang ketua Himpaudi di seluruh kecamatan Bojonegoro telah dilatih pada 4-8 Agustus 2009. Pemilihan dua pembina SBB tingkat kabupaten juga dilakukan—dimana Pembina bertugas sebagai mentor sekaligus memberikan contoh konkrit di lapangan kepada guru tentang bagaimana menerapkan program secara benar.

4. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengajaran untuk Guru SD, SMP dan SMA

Sampai Desember 2010 telah menjangkau 390 guru dan kepala sekolah dari 63 sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas di

Kabupaten Bojonegoro (150 guru dari 20 sekolah), Blora (150 guru dari 23 sekolah) dan Tuban (90 guru dari 20 sekolah). Pelatihan ini merupakan kerjasama lintas lembaga antara MCL, Dinas Pendidikan Kabupaten terkait, UNICEF, dan Yayasan Putera Sampoerna.

5. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengajaran Bahasa Inggris untuk Guru SMA/SMK

Hingga Desember 2010, telah dilatih 90 guru SMA/SMK di Bojonegoro pada 17 April 2009 dan 2 siklus pelatihan bagi 30 guru pada September – Desember 2009. Telah dikembangkan silabus materi pengajaran Bahasa Inggris dan media pengajaran.

Selain itu, Learning Partnership, sebagai mitra MCL dalam menjalankan program, juga melakukan *capacity building training* terhadap tenaga pengajar *Community Learning Centre* (CLC) Desa Sumengko dan peremajaan alat-alat pengajaran multimedia.

6. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Fasilitas untuk Sekolah Menengah Kejuruan

Hingga Desember 2010, telah dikembangkan 5 modul pelatihan kewirausahaan (motivasi, bengkel, keuangan, produksi, dan pemasaran); pelatihan konstruktivisme bagi 20 guru pada Januari – Februari 2009; pelatihan mekatronika dasar bagi 40 guru pada Juli – Oktober 2009; pelatihan manajemen sekolah bagi 26 guru dan staf dan pembangunan laboratorium mekatronika pada Juni 2009.

7. Pelatihan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas Melalui Teknologi Informasi Komunikasi

Kegiatan diterapkan di SMA 1 Kalitidu yang merupakan satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Kalitidu. Bertujuan memberikan pengalaman dan edukasi bagi siswa SMA agar siap dan mumpuni terhadap kemajuan TIK melalui peningkatan keahlian guru dan siswa dalam TIK, penyediaan laboratorium TIK, dan pengajaran TIK.

Hingga Desember 2010 telah tersedia 15 unit PC, 1 LAN Server, dan 1 Internet server; pengembangan kurikulum dan silabus TIK; pelatihan TIK bagi 20 siswa berbakat yang terpilih menjadi Agen TIK, 20 guru, dan 9 orang staf pada 17 – 19 Maret 2009.

8. Perpustakaan keliling

Salah satu program yang diterapkan operator di dunia pendidikan disekitar sumur minyak Banyu Urip adalah program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dimana program ini bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya para kepala sekolah dan guru. Tetapi juga mengubah proses belajar mengajar menjadi lebih aktif, kreatif dan menyenangkan.

Hal ini sependapat dengan Communication Coordinator Mobil Cepu Ltd, Bpk. Ichwan Arifin, menuturkan :

Membangun pendidikan bukan seharusnya hanya dibebankan pada salah satu pihak melainkan menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu butuh dukungan pemerintah, masyarakat dan semua komponen yang ada. Seperti program MBS bekerja sama dengan pemkab dan UNICEF untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. (Wawancara pada tanggal 20 februari 2011, jam 14.15 di Kantor Mobil Cepu Ltd.)

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilaksanakan Mobil Cepu Ltd bersama UNICEF ini telah diterapkan di 37 sekolah SD/MI di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu sejak tahun 2008. Dalam program ini para kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi sasaran program memperoleh pelatihan tentang pengelolaan manajemen, mengalikasikan anggaran, memutuskan materi pendidikan dan buku pelajaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat External Relation Manager Mobil Cepu Ltd, Bpk. Deddy Affidick, menuturkan :

Ini sudah menjadi komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat disekitar lokasi pengeboran. Percuma saja gedungnya bagus kalau tidak diimbangi dengan kualitas SDM tenaga pengajar. Dan program pemberdayaan yang kami berikan kepada masyarakat yang kita laksanakan terus berkesinambungan. (Wawancara pada tanggal 20 februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd.)

Perusahaan pun menyadari bahwa program kemasyarakatan di bidang pendidikan ini merupakan investasi sosial jangka panjang. Yang hasilnya bisa diketahui 20 tahun hingga 30 tahun mendatang.

Berikut ini pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Brabowan, Bpk.Wasi, menuturkan :

Kita senang dengan program di bidang pendidikan yang diberikan MCL. Apalagi dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini melibatkan swadaya masyarakat. Sehingga memunculkan kesadaran masyarakat untuk ikut memiliki sekolah ini. Harapan dari kami adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan ini terus berkelanjutan karena masih banyak sarana dan prasarana yang diperbaiki dan dilengkapi. Karena kalau *njagakno* (mengharapkan bantuan) pemerintah nampaknya masih sulit untuk terealisasi. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 08.00 di SDN Brabowan)

Bukan hanya Sekolah Dasar program kemasyarakatan dibidang pendidikan ini juga telah merambah TK hingga ke lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA meskipun penerapannya belum semaksimal di tingkat SD, namun beberapa lembaga pendidikan tingkat menengah di wilayah kerja MCL telah merasakan program tersebut, baik itu berupa pelatihan maupun bantuan fasilitas berupa komputer.

Berikut ini merupakan hasil gambar dari bantuan fasilitas komputer yang diberikan oleh Mobil Cepu Ltd :

Gambar 9. Bantuan Fasilitas Komputer



Sumber : Hasil Penelitian

Pembangunan gedung sekolah di tingkat SD dan MI, pada di tingkat SMP dan SMA program pemberdayaan hanya difokuskan pada peningkatan kualitas guru dan pelatihan terhadap murid maupun fasilitas komputer.

Hal ini sependapat dengan tokoh masyarakat Banyu Urip, Bpk. Zainuddin, menuturkan:

Kami harapkan kedepan bukan hanya sekolah TK dan SD/MI yang menjadi sasaran program pemberdayaan ini. Sekolah menengah dan kejuruan juga lebih dimaksimalkan. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian MCL terhadap pendidikan warga sini. Ini sangat

membantu sekali dalam mewujudkan pembangunan pendidikan berkualitas. Kalau bisa ada program beasiswa, khusus untuk siswa SMA dan SMK. Sebab untuk SD dan SMP selama ini sudah gratis. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2011, jam 10.00 di Desa Gayam)

Pada tahun 2010-2011, ExxonMobil mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat di 53 desa disepanjang jalur pipa 20 inci mulai Banyu Urip sampai bibir pantai Palang Kabupaten Tuban.

Hal tersebut diatas sependapat dengan, External Relation Manager MCL, Bpk.Deddy Afidick, menuturkan :

Kita sudah menjangring aspirasi dari masyarakat disepanjang jalur pipa. Rata-rata mereka minta pembangunan jalan. Tapi kalau di wilayah Tuban lebih banyak menginginkan pembangunan balai desa. Sebab fasilitas disini (Bojonegoro) dan disana (Tuban) berbeda. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd.)

Output program CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd dalam bidang pengembangan ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Pendirian Perkreditan Rakyat untuk Kredit Usaha Kecil

Program ini dilaksanakan di 15 desa sekitar lokasi *Central Processing Facilities* di Kab. Bojonegoro dan beberapa desa di lokasi Eksplorasi (Kab. Tuban dan Blora) dan sudah memiliki anggota lebih dari 3,000 orang yang mayoritas digunakan untuk keperluan usaha tani, kelontong, dan boga.

Dalam proses pendampingannya, MCL bekerjasama dengan Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan Yayasan Mitra Dhuafa (Yamidha).

Berikut ini adalah tabel rincian bantuan modal untuk masyarakat :

Tabel 9.
Rincian Bantun Modal Kredit Usaha Rakyat

No.	Desa	Jumlah Dana	Keperluan
1.	Begadon	Rp. 23.000.000	Usaha Tani, Ledre
2.	Ringintunggal	Rp. 15.000.000	Kelontong
3.	Beged	Rp. 20.000.000	Tani dan Kelontong
4.	Gayam	Rp. 25.000.000	Tani , Kelontong dan Boga
5.	Mojodelik	Rp. 25.000.000	Tani , Kelontong dan Boga
6.	Kalitidu	Rp. 30.000.000	Tani , Kelontong dan Boga
7.	Katur	Rp. 20.000.000	Tani dan Kelontong
8.	Ngadiluwih	Rp.10.000.000	Tani
9.	Kolong	Rp. 15.000.000	Tani
10.	Setren	Rp. 7.000.000	Tani
11.	Sudu	Rp. 15.000.000	Tani dan Boga
12.	Sumengko	Rp. 15.000.000	Tani dan Boga
13.	Ngasem	Rp. 20.000.000	Tani dan Kelontong
14.	Bonorejo	Rp. 15.000.000	Tani dan Boga
15.	Brabowan	Rp. 15.000.000	Tani dan Boga

Sumber : Mobil Cepu Ltd, Tahun 2011

2. Koperasi Jasa Keuangan dan Penataan Pedagang Kaki Lama

Program ini merupakan kerjasama MCL dengan Pemda Kabupaten. Kegiatan yang diberikan meliputi pembentukan paguyuban PKL, pelatihan manajemen bisnis, dan pelatihan *food safety management* kepada pelaku usaha kaki lima di Kota Bojonegoro.

Dari sektor pemodal, keberadaan Koperasi Jasa Keuangan dinilai cukup membantu 115 PKL binaan program dalam

mengembangkan usahanya. Selain membantu para PKL, Koperasi Jasa Keuangan juga beroperasi untuk umum. Dalam proses pendampingannya, MCL bekerjasama dengan Yayasan Dompot Dhuafa.

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Bojonegoro

Bekerjasama dengan Yayasan Swisscontact Indonesia (YSI), MCL melakukan *value chain map analysis* terhadap sapi ternak, jagung, dan singkong. Sebagai langkah awal, telah dilakukan penguatan kelembagaan terhadap paguyuban ternak dan petani di 15 desa sekitar lokasi *Central Processing Facilities* (CPF) di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu yang kemudian dilanjutkan kepada pembangunan Kandang Belajar Sapi Rakyat (KBSR) di Desa Brabowan.

4. Pelatihan Manajemen Baru bagi Wirausahawan Baru

Pelatihan peningkatan ketrampilan disesuaikan dengan minat 80 peserta pelatihan yang berasal dari 8 desa sekitar *Central Processing Facilities* (CPF), seperti: pelatihan jasa boga, industri kecil batu bata, pupuk organik, dan biogas. Dari pelatihan tersebut, dilakukan pendampingan hingga usaha yang dibentuk mandiri.

5. Peningkatan Kualitas Jalan Poros Desa

Daerah yang telah mendapatkan bantuan program peningkatan kualitas jalan poros desa adalah Desa Brabowan, Mojodelik, Bonorejo, Katur, Gayam, Sudu, Ringintunggal, Begadon, dan Ngraho yang merupakan desa tetangga CPF (*Central Processing Facility*).

Berikut ini merupakan pembangunan jalan poros desa yang merupakan bagian dari program CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd :

Gambar 10. Jalan Poros Desa (Pavingisasi)



Sumber: Hasil Penelitian

Gambar 11. Jalan Poros Desa (Aspal)



Sumber : Hasil Penelitian

Program jangka panjang yang diberikan oleh ExxonMobil adalah program Global Women in Management (GWIM), program ini

bertujuan untuk kaum perempuan dalam memperoleh bekal manajemen organisasi dan pelatihan kepemimpinan.

Hal ini sependapat dengan Tokoh Masyarakat Banyu Urip, Eryul Mufidah, menuturkan bahwa :

Program ini sangat bagus sekali bagi kaum perempuan. Sebab kami jadi mengerti bagaimana cara mengelola management yang baik. Kami pun jadi percaya diri untuk terus mengembangkan diri dalam berwirausaha. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 10.00 di Desa Gayam)

ExxonMobil bermitra dengan Grameen Bank yang berbasis simpan pinjam ini memberikan bantuan permodalan bagi pedagang kecil di wilayah sekitar sumur minyak Banyu Urip yang dikelola Lembaga Penguatan Perempuan Mandiri (LP2M). Serta pelatihan dan bantuan permodalan juga diberikan Mobil Cepu Ltd pada pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan bersama BMT.

Program di bidang perekonomian juga berbasis pada perkembangan sektor peternakan dan pertanian. Program kemasyarakatan yang dilaksanakan Swisscontact Indonesia Foundation ini dilaksanakan di 15 desa di Kecamatan Kalitidu dan Ngasem.

Dalam program ini Swisscontact mengandalkan tiga program andalan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, yakni kandang belajar sapi rakyat (KBSR), budidaya singkong, dan jagung. Pada tahap I ini, Swisscontact telah membangun kandang kurang lebih seluas 1 hektar di Desa

Brabowan, Kecamatan Ngasem dan mengisinya dengan Sapi Cross dan Peranakan Ongol.

Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Pengelola KBSR, Bpk. Kristanto, menuturkan bahwa :

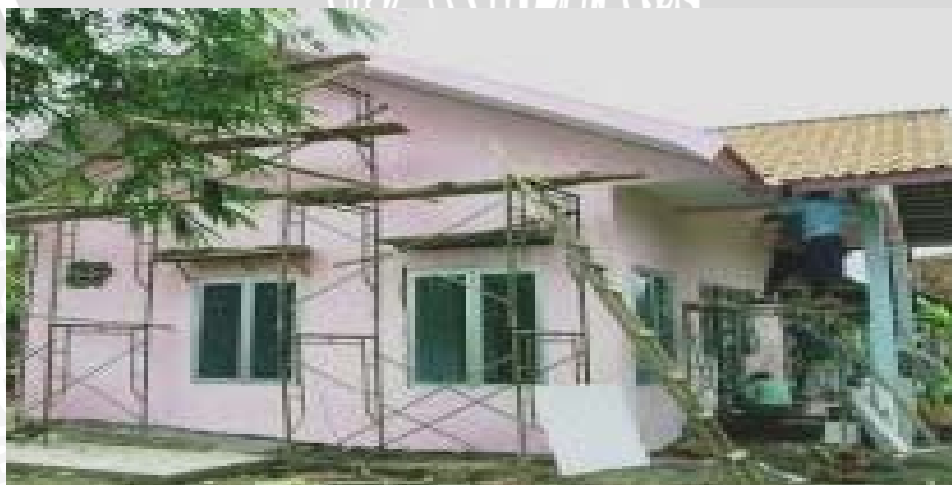
Kita ingin keberadaan kandang ini sebagai pusat pelatihan bagi masyarakat (kelompok ternak) untuk berbudi daya sapi yang benar dan menguntungkan. Selain disiapkan kandang belajar, juga akan dicarikan pangsa pasar dan memberikan pinjaman modal bagi peternak. Sejauh ini program KSBR ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar dan pengalaman baru bagi kita.(Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 11.00 di Brabowan)

Output program CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd dalam bidang pengembangan ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki Fasilitas Kesehatan, yaitu:

MCL melakukan peremajaan terhadap alat-alat kesehatan di 12 Polindes yang terletak di Kecamatan Dander, Ngasem, dan Kalitidu dan juga melakukan pembangunan Polindes yang terletak di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem.

Gambar 12.
Perbaikan Polindes



Sumber : Hasil Penelitian

2. Peningkatan Kualitas dan Pelatihan Kesadaran Sanitasi Lingkungan

Hingga Desember 2010, telah dibangun 11 sumur dan tower air di 11 Desa di sekitar daerah operasi; 11 sistem jaringan distribusi air kepada lebih dari 3000 KK; 11 komite pengelola air bersih; peningkatan pendapatan desa melalui retribusi air; pelatihan manajemen air dan budaya sanitasi.

Berikut ini merupakan gambar tower air yang merupakan pembangunan ExxonMobil di bidang kesehatan :

Gambar 13. Tower Air



Sumber : Hasil Penelitian

3. Pelatihan Manajemen Pelayanan dan Peningkatan Fasilitas Puskesmas

Hingga Desember 2010, dilakukan diagnosa organisasi terhadap 5 Puskesmas untuk mengetahui kondisi awal dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan; *training for trainers* dari Puskesmas; dan terbentuknya Forum Desa Siaga Sehat dan kader Desa Siaga. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan Layanan Kesehatan Cuma-cuma Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

4. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Hingga Desember 2010, telah dilakukan 45 kali pelayanan kesehatan keliling, pemberian makanan tambahan, dan khitan massal di 15 desa di sekitar *Central Processing Facility* (CPF) yang menjangkau tidak kurang dari 3500 penerima manfaat; pendataan penyakit dan penderita; revitalisasi prosyandu dan promosi kesehatan; penyuluhan ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta pemberian makanan tambahan.

Kegiatan ini merupakan prakarsa MCL dan LSM lokal yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat, Community Health Centre. Bantuan sepeda motor sampah, sebagai sarana penunjang operasional Pemerintah Daerah terhadap upaya penataan lingkungan dan kebersihan di Bojonegoro.

5. Peningkatan Kualitas Bidan Desa

Program ini diikuti bidan dari 15 desa di tiga Kecamatan di Bojonegoro, yakni Kecamatan Ngasem, Kalitidu dan Dander. Desa yang menjadi sasaran program ini antara lain; desa Ngunut , Kecamatan Dander; Desa Sendangrejo, Bandungrejo, Ngasem, Mojodelik, Gayam, Ringintunggal, Begadon, Brabowan, Bonorejo dan Ngantru, Kecamatan Ngasem. Kemudian, Desa Sudu, Sumengko, Beged, Katur, Pumpungan dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu. Selain pihak Mobil Cepu Ltd, dalam pelaksanaan program ini didampingi oleh Dinas Kesehatan, Kepala Desa, Dokter Puskesmas dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bojonegoro.

Berikut ini merupakan pernyataan Bpk. Remy Mawardijaya selaku Field Public and Government Affair Manager Mobil Cepu Ltd, menuturkan bahwa:

Program pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Diharapkan dengan

pelatihan ini nantinya peserta bisa mengembangkan didaerahnya sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui peran badan dan dukungan semua komponen yang ada serta pemerintah akan memudahkan dalam merubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM para bidan dalam mendukung program pembangunan kesehatan disini. (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd)

Membangun kesehatan tidak hanya berpedoman pada pembangunan sarana dan infrastruktur saja, membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kesehatan juga sangat diperlukan dalam pengembangan kesehatan. Jika kesadaran akan kesehatan dari masyarakat sudah terpupuk secara baik, fasilitas infrastruktur akan sangat bisa mendukung program.

Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Ibu Susi selaku Anggota DPRD Kab. Bojonegoro, menuturkan bahwa:

Dari ketiga pilar program yang diberikan MCL yang kurang maksimal adalah di bidang kesehatannya. Terutama program pengobatan gratis yang diberikan untuk masyarakat masih kurang merata. Saya harap hal seperti ini agar cepat diperbaiki oleh pihak MCL, agar tidak menimbulkan protes dari warga. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2011, jam 08.00 di Kantor DPRD)

Pengobatan gratis ini sistemnya secara periodik, bertujuan agar kesehatan masyarakat lebih baik lagi.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat External Relation Manager, Bpk. Deddy Affidick, menuturkan :

Program yang kami berikan sifatnya adalah jangka panjang, namun kita juga memberikan program jangka pendek yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Perlu memakan waktu untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Bukan berarti bahwa kekurangan dari program yang kita gulirkan sepenuhnya adalah kesalahan kita, akan tetapi itu adalah bagian dari proses. Saya kira perkembangan di sektor kesehatan sudah bida dilihat hasilnya, salah satunya adalah sanitasi lingkungan dengan

tower air. , (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd)

(3). Kendala-kendala dalam Implementasi CSR ExxonMobil

1. Persepsi dan Komitmen dengan Pemerintah dan Masyarakat masih belum kondusif

Tuntutan kesejahteraan dan keselamatan dari warga sekitar sumur minyak Banyu Urip merupakan salah satu motivasi ExxonMobil dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari agenda *Corporate Social Responsibility* (CSR). Persepsi mengenai kegiatan CSR yang beragam di kalangan masyarakat seringkali menimbulkan kesenjangan maupun juga memicu konflik, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program CSR merupakan salah satu alasan masyarakat untuk cenderung memojokkan keberadaan perusahaan ExxonMobil yang menunjuk Mobil Cepu Ltd sebagai operator utama Blok Cepu dan anak perusahaan ExxonMobil. Program CSR yang besistem jangka panjang yang seyogyanya dapat dilihat hasil keseluruhannya pada 20 atau 30 tahun mendatang, seringkali menimbulkan kekhawatiran dari pihak pemerintah dan masyarakat mengenai implementasi dari agenda-agenda dan target yang menjadi pedoman pelaksanaan CSR ExxonMobil.

Berikut ini merupakan pernyataan Communication Coordinator Mobil Cepu Ltd, Bpk. Ichwan Arifin, menuturkan:

Tahun 2006 kita mulai aktifitas pemberdayaan masyarakat, ini (program kemasyarakatan) merupakan program jangka panjang yang idealnya bisa diketahui hasilnya 20 sampai 30 tahun mendatang. Meski demikian, kita

juga melengkapi dengan program jangka pendek yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2011, jam 15.00 di Kantor Mobil Cepu Ltd.)

b) Keterbatasan SDM

Mobil Cepu Ltd melaksanakan kegiatan CSR mulai tahun 2006 dan mulai memberikan perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, walaupun belum sepenuhnya tuntutan masyarakat dapat terealisasi. Sinergitas antara pihak ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd dengan pemerintah dan pendamping seperti LSM lokal maupun dari luar Kabupaten merupakan faktor penting dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan CSR.

Seringkali dalam pelaksanaan kegiatan CSR, pihak Mobil Cepu Ltd tidak bisa memaksimalkan pelaksanaan CSR karena Sumber Daya Manusia yang terbatas dan mengakibatkan kinerja yang lambat dalam mekanisme pelaksanaan. Sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan misi pemerintah dan LSM agar dapat menghasilkan output yang maksimal dalam bentuk program-program pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip.

B. ANALISIS DATA

(1). Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Terhadap masyarakat Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatier (dalam Wahab, 1997) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1990:51), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah UU No.40 Tahun 2007, yang berisi mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, yang pada hakekatnya harus dipatuhi dan diamalkan ketentuan dan isinya. Disamping untuk mematuhi peraturan perundangan, kegiatan CSR ini secara tidak langsung untuk

mempertahankan eksistensi perusahaan ExxonMobil dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam setiap kegiatan industrinya.

Dalam hal ini Implementasi CSR ExxonMobil diserahkan sepenuhnya oleh anak perusahaannya yaitu Mobil Cepu Ltd. Peran Mobil Cepu Ltd adalah operator lapangan dari Blok Cepu sekaligus sebagai pihak penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan CSR oleh Mobil Cepu Ltd mulai dilaksanakan pada Tahun 2006, sebagai bagian dari masyarakat, ExxonMobil menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak terlepas dari kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang sejahtera, terutama daerah sekitar sumur minyak di Banyu Urip akan mendukung pertumbuhan bisnis ExxonMobil. Demikian pula seperti pendapat teori George C. Edward III dalam Winarno (2002 : 125-126), yang menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan , maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Perjanjian Operasi Bersama atau Joint Operating Agreement (JOA) telah ditandatangani oleh pihak-pihak kontraktor, dimana ExxonMobil berperan sebagai operator dari KKS Cepu mewakili para Kontraktor, dan menunjuk Mobil Cepu Ltd. sebagai operator lapangan. Peran Mobil Cepu Ltd. dalam hal ini adalah sebagai pihak yang didelegasikan oleh

ExxonMobil untuk urusan perusahaan dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar wilayah eksplorasi ExxonMobil, semua hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tanggung jawab Mobil Cepu Ltd., dan atas persetujuan ExxonMobil Oil. Mobil Cepu Ltd merupakan bagian dari ExxonMobil, semua hal yang dilakukan oleh Mobil Cepu Ltd terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk tanggung jawab ExxonMobil terhadap kewajibannya untuk memenuhi regulasi maupun strategi dalam eksistensi perusahaan.

Kemampuan pemerintah daerah setempat masih terbatas dalam membangun daerahnya, kebijakan pembangunan sentralistik pada era sebelum reformasi menyebabkan pembangunan tidak merata, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Target dan sasaran ExxonMobil adalah untuk memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat dan pemerintah setempat dalam memecahkan permasalahan sosial melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan Mobil Cepu Ltd, anak perusahaan ExxonMobil.

Pelaksanaan program pemberdayaan dilaksanakan secara swadaya (dukungan dana maksimal 15 %) sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, LSM pendamping melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan.

Melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan CSR, ExxonMobil mengarahkan kegiatan CSR yang

mempunyai visi dan misi dalam hal pengemderdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Mobil Cepu Ltd. yang bertindak sebagai operator lapangan dari Perusahaan ExxonMobil mengimplementasikan suatu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social responsibility* (CSR). CSR memiliki misi dan tujuan untuk membangun hubungan dengan masyarakat guna pengembangan masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan perusahaan.

CSR yang dilaksanakan ExxonMobil sebagai bagian dari kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, sebagai salah satu stakeholder penting, sekaligus sebagai pihak yang paling potensial terkena dampak daerah operasi sumur minyak Banyu Urip. Dunia usaha menyadari bahwa bisnis akan dapat tumbuh subur di lingkungan masyarakat yang sejahtera. Menurut hasil pengamatan saya masyarakat sekitar Banyu Urip ini sebagian besar tergolong sebagai masyarakat menengah kebawah dengan mata pencaharian petani, sehingga keberadaan perusahaan asing di tengah-tengah mereka sangat diharapkan sekali untuk setiap langkah perubahan taraf hidup mereka, meskipun dalam hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perusahaan asing seperti ExxonMobil mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan mereka. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi (keuntungan), sosial, dan ekologi. CSR juga alat penghubung aktif bagi perusahaan dengan masyarakat maupun pemerintah.

Komitmen ExxonMobil untuk mendukung dan membantu upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan CSR ExxonMobil merupakan refleksi nilai dan budaya perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan masa kini dan mendatang yang memberikan manfaat bagi shareholder maupun stakeholders.
2. Mengingat kondisi nyata masyarakat sekitar, penerapan CSR saat ini lebih diprioritaskan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam memecahkan permasalahan sosial yang kemungkinan terjadi pada masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip.

Ada tiga pilar program CSR yang menjadi acuan operator lapangan Blok Cepu, yakni Mobil Cepu Ltd (MCL) anak perusahaan ExxonMobil, dalam melaksanakan kegiatan industrinya. Yakni sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Semuanya berbasis pada program kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat sekitar. Rangkaian program tersebut telah dilaksanakan jauh sebelum sumur minyak Banyu Urip, yang berada di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Ngasem mulai berproduksi. Hal itu sesuai tanggung jawab sosial perusahaan yang diemban Mobil Cepu Ltd..

Meskipun sangat disadari jika program pemberdayaan bukanlah suatu program instan, namun semuanya merupakan bagian dari program untuk kepentingan masyarakat. Selain juga program yang berawal dari usulan

masyarakat tersebut menjadi hal yang tidak bisa dihindari bagi pelaku industri. Program yang di beberapa bidang tersebut dilakukan secara sistematis dan terprogram secara matang.

Seperti halnya dengan program pemberdayaan di bidang kesehatan, membangun kesehatan masyarakat bukan sekedar membangun sarana dan infrastruktur belaka. Lebih dari itu, membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kesehatan. Jika kesadaran akan kesehatan dari masyarakat sudah terpupuk secara baik, fasilitas infrastruktur akan sangat bisa mendukung program lain yang merupakan kepentingan bersama.

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, diantaranya adalah menyiapkan kualitas tenaga medis untuk mendukung pelayanan di tingkat desa. Karena pada dasarnya wilayah sekitar sumur minyak Banyu Urip adalah wilayah yang kurang kondusif dan kualitas kesehatan di wilayah tersebut kurang baik, oleh karena itu salah satu tujuan program CSR Mobil Cepu Ltd. adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ke taraf yang lebih baik lagi dengan memberi pelatihan-pelatihan kepada para bidan desa agar lebih matang dalam member pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Begitu pula dengan program pemberdayaan di bidang pendidikan, tak hanya melakukan pembangunan dan rehabilitasi lokal bangunan lembaga sekolah, namun ExxonMobil juga melakukan peningkatan kualitas pendidik. Peningkatan kualitas di dunia pendidikan tidak sekedar menjadi tanggung

jawab perusahaan namun merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah. Namun disinilah peran perusahaan asing untuk membantu pemerintah dalam pembangunan, sesuai dengan bunyi UUPT No.40 Tahun 2007. Dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat yang menjadi subyek pembangunan, bahwasannya masyarakat harus bisa dituntut untuk bisa berusaha dalam memajukan pendidikannya, salah satunya dipancing dengan program-program pemberdayaan yang diberikan oleh ExxonMobil maupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu ExxonMobil menggandeng stakeholder dalam setiap program pemberdayaannya, termasuk LSM agar programnya dapat berjalan semaksimal mungkin.

Begitu pula dalam bidang ekonomi, untuk pembangunan dalam sektor ini Mobil Cepu Ltd. juga telah menggulirkan berbagai program. Sama dengan program pemberdayaan bidang lainnya. Program pemberdayaan ekonomi, baru akan terasa dampaknya secara meluas setelah program berjalan 20 tahun mendatang. Sebab, program pemberdayaan merupakan program jangka panjang yang berkesinambungan. Sayangnya, program jangka panjang semacam ini, kurang banyak disadari masyarakat. Masyarakat masih melihat program pemberdayaan sebagai bantuan dari perusahaan untuk waktu sesaat. Oleh karena itu, program pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan tidak bisa serta merta dilihat keberhasilannya. Karena program pemberdayaan ekonomi merupakan program

berkesinambungan. Butuh jangka waktu yang cukup lama untuk melihat dan dirasakan keberhasilannya.

(a). Mekanisme, Pola pelaksanaan dan Keberlanjutan program CSR

Mobil Cepu Ltd, sebagai anak perusahaan ExxonMobil Oil yang merupakan operator utama Blok Cepu berperan sebagai pelaku utama dari pelaksanaan CSR ini, akan tetapi program yang akan dilaksanakan merupakan hasil persetujuan dari BP-Migas maupun ExxonMobil. Untuk memaksimalkan program-program CSR ini tidak hanya melibatkan pihak *shareholder* saja, namun juga mulai dari pemerintah, lembaga perusahaan, masyarakat dan LSM lokal (Bojonegoro) maupun dari daerah luar Bojonegoro. Semua dilakukan agar program yang bermula dari usulan warga bisa menjadi tepat sasaran. Sekaligus membawa perubahan signifikan bagi warga masyarakat yang menjadi sasaran target pembangunan.

Program CSR ExxonMobil ini harus sesuai dengan kondisi masyarakat, termasuk di dalam mekanisme implementasi CSR tersebut melibatkan masyarakat, dengan cara mewujudkan permintaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga program CSR yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, berjalan sistematis dan terprogram secara matang. Namun juga harus disesuaikan dengan agenda pemerintah, agar Mobil Cepu Ltd bisa menjadi mitra kerja yang baik dalam konteks pembangunan melalui program CSRnya. Masing-masing elemen dalam hal ini mempunyai porsi dan kapasitas tersendiri dalam setiap program yang akan dilaksanakan.

Program-program CSR Mobil Cepu Ltd bersifat jangka panjang dan berkesinambungan, serta mendidik masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program yang dilaksanakan. Sehingga swadaya masyarakat ini akan membentuk suatu kultur yang baru di dalam pola hidup masyarakat Banyu Urip, selain itu dengan swadaya masyarakat akan menimbulkan rasa memiliki terhadap setiap bantuan maupun pembangunan yang diberikan oleh ExxonMobil melalui anak perusahaannya, yaitu Mobil Cepu Ltd.. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, masyarakat di samping mendapat bantuan permodalan sebelumnya akan diberi pelatihan tentang pengelolaan dana. Baik itu sifatnya simpan pinjam maupun bantuan permodalan bergulir yang baru akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, setelah target program berjalan.

Pada kondisi demikian tidak mudah bagi warga masyarakat karena mereka yang pada kondisi terjepit secara ekonomi, lebih memilih bantuan instan. Selain itu, ExxonMobil melalui program-program CSRnya juga memiliki tanggung jawab merubah kultur petani menjadi kultur berniaga, atau mengarahkan mereka ke wilayah kerja penyedia jasa.

Hal itulah yang seringkali menjadi silang sengketa. Baik pada wilayah opini di masyarakat maupun pada ranah aplikasi dari program yang telah digulirkan. Akan tetapi dampak dari program yang telah digulirkan oleh Mobil Cepu Ltd mulai dirasakan warga masyarakat. Paling tidak pembangunan infrasturktur jalan dan gedung sekolah telah dirasakan oleh warga sekitar sumur minyak Banyu Urip.

Disamping dengan swadaya masyarakat, mekanisme pelaksanaan CSR ini juga melibatkan LSM sebagai alat pendamping maupun penghubung bagi masyarakat dan perusahaan. Hal ini bertujuan agar program yang diberikan tepat sasaran, dan tidak berkesan dipaksakan terhadap masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Akan tetapi didalam pelaksanaan CSR ini LSM lokal dari Kabupaten Bojonegoro yang ikut berpartisipasi hanyalah beberapa saja. Dari sumber Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Bojonegoro, saat ini tercatat 4 LSM yang ikut mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti, rangkaian program yang telah dilakukan ExxonMobil selama ini sebagian besar yang berjalan dengan baik hanya di daerah terdekat sumur minyak Banyu Urip, yaitu terdiri dari beberapa desa di Kecamatan Ngasem. Dari pihak pemerintah berharap agar program yang diberikan tidak sebatas dilakukan di desa yang terdekat dengan sumur minyak Banyu Urip, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial antar desa. Sedangkan dari pihak Mobil Cepu Ltd memandang, semua program pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Bahkan, semua program atas persetujuan ExxonMobil dan BP Migas. Selain dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, setiap program juga disinergikan dengan program pemerintah daerah, agar tidak mendahului wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hingga saat ini program CSR yang dilaksanakan sejak tahun

2006 masih terus berjalan dan berlangsung lama karena sistemnya berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan program CSR dapat ditentukan oleh efektifitas dari program yang sudah dirumuskan oleh pihak perusahaan, yakni ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd beserta BP Migas. Tujuan perusahaan yakni menginginkan program yang menjadikan masyarakat menjadi subyek yang melaksanakan program dan tidak hanya menjadi obyek kegiatan CSR. Hal ini dilaksanakan agar program-program CSR dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

(b). Output program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd.

Program CSR ExxonMobil yang di delegasikan kepada Mobil Cepu Ltd selaku anak perusahaan sekaligus operator lapangan Blok Cepu, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, dengan di dampingi oleh LSM sebagai pihak pembantu dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

Selain memberikan program pemberdayaan masyarakat, tanggungjawab sosial ExxonMobil terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip juga diwujudkan dalam bentuk ganti rugi lahan, karena dalam proses produksi dan eksplorasi menggunakan lahan masyarakat, ganti rugi lahan di berikan kepada masyarakat yang tanahnya digunakan perusahaan untuk kegiatan usaha. Tanggungjawab sosial perusahaan diberikan untuk

masyarakat yang berada disekitar wilayah dimana perusahaan itu melakukan kegiatan usaha, termasuk pula tanggungjawab untuk wilayah yang kemungkinan terkena dampak lingkungan dari kegiatan usaha Mobil Cepu Ltd. Hak masyarakat Banyu Urip untuk mendapatkan ganti rugi lahan telah dipenuhi oleh Mobil Cepu Ltd.

Masalah ganti rugi lahan dan permasalahan mengenai dampak lingkungan sudah dipenuhi oleh Mobil Cepu Ltd, misalnya saja dalam masalah sanitasi air warga sekitar sumur minyak Banyu Urip, tujuan perusahaan adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam masalah lingkungan di sektor kesehatan, terutama kebutuhan air bersih dengan memberikan sanitasi air.

(2). Peran CSR ExxonMobil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

a. Gambaran Umum wilayah Sekitar Sumur Minyak Banyu Urip Sebelum adanya CSR

Banyu Urip merupakan nama daerah penghasil minyak, tepatnya disebut dengan sumur minyak, penamaan tersebut berdasarkan peta geologi. Terletak di Desa Gayam Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dan berdekatan dengan Kecamatan Kalitidu. Daerah ini tergolong sebagai daerah yang kurang kondusif dan rata-rata penduduknya memiliki pengalaman pendidikan yang relative rendah, hanya sebagian kecil yang mengenyam bangku sekolah SMA maupun perguruan tinggi. Demikian pula dengan potret perekonomian di daerah ini, banyak terdapat masyarakat miskin

maupun berpenghasilan rendah, sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani.

Demikian pula dengan Kabupaten Bojonegoro yang tergolong sebagai 5 Kabupaten miskin di Jawa Timur. Ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di setiap bagian wilayah di Kabupaten Bojonegoro mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini, hal ini didukung dengan adanya potensi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sumber minyak dan Gas bumi melimpah sehingga pembangunan yang berkembang pesat sangat diharapkan demi kesejahteraan bersama.

b. Gambaran Umum daerah Banyu Urip Setelah adanya CSR

Peran Mobil Cepu Ltd sebagai pelaksana UU No.40 Tahun 2007 mengenai CSR adalah untuk memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar daerah operasi sumur minyak, sehingga dalam hal ini yang mempunyai hak penuh atas target sasaran dalam setiap program yang dilaksanakan adalah masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah sekitar sumur minyak Banyu Urip, yakni Beberapa Desa di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Kesejahteraan masyarakat yang merupakan agenda penting dalam kegiatan CSR Mobil Cepu Ltd, diperkuat dengan konsep *Triple Bottom Line* (John Elkington) dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P, yakni *Profit*, *Planet* dan

People. Profit yaitu selain mengejar keuntungan dari kegiatan usaha, harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan (*planet*). Demikian pula yang dijalankan Mobil Cepu Ltd, program pemberdayaan yang dirumuskan dalam tiga pilar yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan mulai membawa perubahan, meskipun belum merata di seluruh warga masyarakat, namun dampaknya sudah bisa mulai dirasakan. Salah satu aktor yang berperan penting adalah sektor privat atau bisnis. Hal ini dikarenakan praktek bisnis dapat dilihat dari aspek dan sudut pandang apapun harus baik terhadap perlakuan kepada masyarakat sekitar industri, konsumen, pemerintah dan yang paling penting terhadap lingkungan sekitar dapat membawa dampak negatif.

Menurut Friedman (1992), Karakteristik *Community Development* diartikan sebagai berikut:

The Empowerment approach places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning.

(pendekatan pemberdayaan menekankan pada otonomi dalam pembuatan keputusan dari wilayah organisasi masyarakat, kepercayaan diri daerah akan tetapi bukan negara dibawah otoriter, demokrasi dan pembelajaran pengalaman sosial).

Oleh karena itu, Pemerintah meminta komitmen swasta secara khusus sebagai wujud pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan. CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama stakeholder terkait, terutama adalah masyarakat disekeliling dimana perusahaan tersebut

beroperasi. Peran CSR terhadap perusahaan adalah berkaitan dengan eksistensi perusahaan, hal ini sesuai dengan Teori *Competitive Advantage*, Michael Porter, yang menjelaskan bahwa konsep sosial merupakan bagian dari strategi perusahaan.

Warhurst dalam Wibisono (2007:56) berpendapat, hubungan CSR dan masyarakat terwujud dalam empat hal utama, yaitu :

1. kontribusi pada pengembangan masyarakat (Comdev)
2. pengikutsertaan (pemrioritasan) kesempatan kerja dan usaha
3. pembiayaan sesuai kerangka legal
4. tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.

Peran CSR semakin penting dalam mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial korporat bagi terciptanya keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini juga berangkat dari kenyataan bahwa selain sebagai institusi ekonomi, perusahaan juga merupakan institusi sosial, dengan demikian diharapkan perusahaan dapat maju dan berkembang secara harmonis bersama masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, Mobil Cepu Ltd memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu sasaran bisnis perusahaan, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar daerah operasi sumur minyak. Lingkungan daerah sekitar yang mempunyai potensi untuk terkena dampak polusi dari kegiatan usaha ExxonMobil, serta ganti rugi lahan yang diberikan perusahaan untuk masyarakat lahannya digunakan

untuk kegiatan usaha ExxonMobil yang diserahkan kepada anak perusahaannya yaitu Mobil Cepu Ltd..

Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Seperti halnya program kegiatan berupa pemberian bantuan dana untuk pembangunan poros desa dengan pavingisasi dan pembangunan infrastruktur lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk pula pemberian bantuan pelayanan kesehatan warga di sekitar sumur minyak Banyu Urip. Sehingga hal ini memberikan perubahan terhadap kondisi desa di sekitarnya salah satunya adalah Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, telah menuai perubahan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari sisi fisik fasilitas umum hingga tingkat sosial warga masyarakat.

Selain itu, dari hasil pengamatan peneliti, desa yang ada di sekitar sumur minyak yang sudah merasakan bantuan untuk pembangunan jalan paving adalah Desa Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Begadon dan Desa Ringintunggal, Kecamatan Ngasem. Sedangkan desa di wilayah Kecamatan

Kalitidu adalah Desa Beged. Tidak hanya hal itu, program pembangunan dan perbaikan gedung sekolah juga sudah berhasil dilakukan Mobil Cepu Ltd di sekitar wilayah kerja tersebut.

Meskipun belum signifikan, namun perubahan tersebut sudah dirasakan warga di sekitar Blok Cepu. Perubahan yang sangat dirasakan adalah pembangunan infrastruktur jalan paving dan pembangunan gedung sekolah. Sehingga dengan pembangunan infrastruktur jalan akan memacu perekonomian dan SDM warga juga semakin ada peningkatan.

Menurut Grindle dalam (Wibawa, 1994:22) Variabel keberhasilan Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mobil Cepu Ltd dapat ditinjau dari :

1. Sejauh mana sejauh mana kepentingan kelompok sasaran
2. Jenis manfaat yang diterima oleh sasaran atau target
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah implementornya sudah rinci
6. Apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, jenis manfaat adalah respon dari masyarakat mengenai program yang diberikan oleh perusahaan. Peningkatan kesejahteraan merupakan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, program yang diberikan dapat dinilai tepat sasaran atau tidak apabila terdapat tuntutan dari

masyarakat terhadap perusahaan. SDM yang memadai akan mendukung keberlangsungan program pemberdayaan terhadap masyarakat.

Sedangkan peran stakeholder dalam pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan : pengarah bisnis, pelatihan, manajemen, informasi pasar, penyedia dana awal, penciptaan usaha penunjang
2. Pemerintah : Informasi data ekonomi dan sosial, kebijakan pendukung, fasilitasi sarana/prasarana, dan penyertaan modal, penyertaan pembiayaan
3. Masyarakat : Kesepakatan, pelaku
4. LSM/Perguruan Tinggi : Penggerak, penghubung, pendekatan, pencetus, pendampingan

Manfaat masyarakat pada perusahaan yaitu sebagai wadah untuk melaksanakan suatu program sebagai bentuk mendapatkan reputasi dan citra yang lebih baik bagi perusahaan. Dan sebagai lisensi untuk beroperasi secara sosial terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip. Serta dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal. Masyarakat sekitar Banyu Urip yang sudah dipenuhi kesejahteraannya akan bisa memberikan keamanan yang lebih besar terhadap perusahaan. Jika infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi menjadi lebih baik akan berimbas baik pula pada eksistensi perusahaan migas ExxonMobil. Komitmen perusahaan untuk menjadikan masyarakat sebagai tenaga kerja, pemasok, pengelola jasa, pelanggan lokal serta wadah untuk pembelajaran untuk berinovasi merupakan bagian dari

CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan dalam kegiatan CSR Mobil Cepu Ltd, manfaat perusahaan pada komunitas adalah sebagai peluang kerja, pengalaman kerja dan pelatihan keterampilan. Serta pendanaan investasi komunitas dan pengembangan infrastruktur adalah sebagai kewajiban perusahaan melalui kegiatan CSRnya. Kisaran dana untuk menyelenggarakan program pemberdayaan mulai tahun 2006 sampai sekarang di perkirakan mencapai 21 Milyar.

Dana yang digunakan untuk keperluan tanggung jawab sosial termasuk juga ganti rugi lahan seharusnya diperoleh dari hasil produksi di Blok Cepu, akan tetapi kegiatan eksplorasi masih dalam tahap Early Production sehingga dana yang digunakan diambilkan dari pendapatan ExxonMobil dalam bentuk investasi awal untuk wilayah di sekitar sumur minyak di Blok Cepu (Banyu Urip). Namun dalam produksi puncaknya yang mencapai 160.000 barrel per hari, kegiatan CSR ExxonMobil oleh Mobil Cepu Ltd, harus dapat memenuhi ketentuan hukum yakni 2% keuntungan setelah pajak.

Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007, yakni harus menyisihkan 2% dari keuntungan setelah pajak setiap tahunnya. Saat ini ExxonMobil masih belum bisa memenuhi ketentuan hukum yang ada, karena dalam prakteknya melalui kegiatan CSR Mobil Cepu Ltd, masih menggunakan dana dengan istilah investasi awal, dengan alasan karena

masih dalam tahap Early Production. Perhitungan rincian dana yang seharusnya digunakan untuk CSR dapat dikalkulasikan pada tahun 2012.

Peran CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd dalam Bidang Pendidikan bertujuan untuk menunjang kegiatan peningkatan kapasitas tenaga ajar guru TK/pra sekolah dan sekolah dasar di sekolah-sekolah yang terletak di sekitar *Central Processing Facilities* (CPF) dan *Early Production Facility* (EPF).

Untuk meningkatkan rasa kepemilikan dari pihak sekolah dan komite sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan dilaksanakan secara swadaya yang pengerjaannya diawasi bersama oleh LSM pendamping dan tim pengawas dari perwakilan desa (unsur Pemerintahan Desa dan BPD). Kegiatan meliputi pembangunan kelas dan kompleks sekolah, fasilitas sanitasi sekolah, pengadaan peralatan ajar, dan pembangunan taman bermain.

Pelatihan ketrampilan teknik industri migas bertujuan untuk menyiapkan tenaga lokal siap pakai yang memiliki kompetensi dan ketrampilan di bidang industri migas seperti: operator alat berat (*crane* dan *forklift*), instalasi listrik industri, instalasi pipa, mesin diesel, dan las listrik.

Sejak tahun 2006, MCL telah membina 35 Taman Kanak-kanak Semai Benih Bangsa (SBB) yang terletak di Kecamatan Kalitidu dan Ngasem. Untuk mendukung keberlanjutan pembinaan, pelatihan penyegar (*refresher training*) dimaksudkan untuk menjaga kualitas pendidikan anak usia dini yang tergabung dalam TK SBB.

Sebanyak 70 guru dan 27 orang ketua Himpaudi di seluruh kecamatan Bojonegoro telah dilatih pada 4-8 Agustus 2009. Pemilihan dua pembina SBB tingkat kabupaten juga dilakukan—dimana Pembina bertugas sebagai mentor sekaligus memberikan contoh konkrit di lapangan kepada guru tentang bagaimana menerapkan program secara benar.

Pelatihan peningkatan kualitas pengajaran untuk guru SD, SMP dan SMA bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidikan (guru dan kepala sekolah) melalui serangkaian pelatihan, yaitu: (1) teknik mengajar; (2) kapasitas diri seperti perencanaan pengajaran, refleksi dan motivasi diri, dan manajemen lingkungan pengajaran; (3) lokakarya trend dunia pendidikan terbaru, best practices, dan perluasan jaringan antar pengajar; (4) strategi perubahan untuk kesinambungan materi pelatihan.

Pelatihan peningkatan kualitas pengajaran bahasa inggris untuk guru sma/smk bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran bahasa inggris bagi guru SMA/SMK melalui keterampilan mengajar, kepercayaan diri, pengembangan kurikulum dan silabus, dan kepemimpinan.

Peningkatan kualitas pengajaran dan fasilitas untuk sekolah menengah kejuruan bertujuan menguatkan lembaga dan manajemen smk santo yosef yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora melalui penerapan model pembelajaran konstruktivisme, peningkatan kompetensi guru basic mekatronika, pemenuhan kelengkapan praktek, pembentukan unit produksi, dan bantuan pendidikan.

Native Speaker Program, bertujuan untuk mendekatkan masyarakat sekitar terhadap keberadaan proyek melalui metode pembelajaran bahasa Inggris dengan menghadirkan sukarelawan perusahaan ke SMP/SMA di Kabupaten Bojonegoro. Program ini dilaksanakan tiap bulan sepanjang tahun.

Pada dasarnya membangun pendidikan bukan hanya didasarkan pada pembangunan gedung sekolah saja. Melainkan perlu didukung sumber daya tenaga pengajar yang berkualitas dan keterlibatan masyarakat. Metode inilah yang digunakan ExxonMobil melalui pelaksanaan CSR yaitu Mobil Cepu Ltd, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Salah satu program yang diterapkan operator di dunia pendidikan disekitar sumur minyak Banyu Urip adalah program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dimana program ini bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya para kepala sekolah dan guru. Tetapi juga mengubah proses belajar mengajar menjadi lebih aktif, kreatif dan menyenangkan.

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilaksanakan Mobil Cepu Ltd bersama UNICEF ini telah diterapkan di 37 sekolah SD/MI di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu sejak tahun 2008. Dalam program ini para kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi sasaran program memperoleh pelatihan tentang pengelolaan manajemen, mengalikasikan anggaran, memutuskan materi pendidikan dan buku pelajaran.

Selain itu juga mengevaluasi kinerja guru dan murid serta kegiatan lain yang diperlukan untuk membangun kualitas sekolah dibawah pengawasan masyarakat setempat. Disamping memberikan pelatihan, untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar Mobil Cepu Ltd juga telah melakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah di sekitar wilayah *Gas Oil Separation Plant (GOSP)*, tepatnya adalah daerah sekitar sumur minyak Banyu Urip. Pelaksanaan pembangunan gedung sekolah ini pun melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat tak sekedar jadi obyek, melainkan bertindak sebagai subyek dalam program ExxonMobil.

Perusahaan pun menyadari bahwa program kemasyarakatan di bidang pendidikan ini merupakan investasi sosial jangka panjang. Yang hasilnya bisa diketahui 20 tahun hingga 30 tahun mendatang.

Bukan hanya Sekolah Dasar program kemasyarakatan dibidang pendidikan ini juga telah merambah TK hingga ke lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA meskipun penerapannya belum semaksimal di tingkat SD, namun beberapa lembaga pendidikan tingkat menengah di wilayah kerja MCL telah merasakan program tersebut, baik itu berupa pelatihan maupun bantuan fasilitas berupa komputer.

Perubahan yang signifikan sangat terlihat sekali dibanding dengan sebelumnya. Terutama yang bisa dilihat perubahannya adalah pembangunan gedung sekolah di tingkat SD dan MI, pada di tingkat SMP dan SMA program pemberdayaan hanya difokuskan pada peningkatan kualitas guru dan pelatihan terhadap murid maupun fasilitas komputer.

Selain membangun gedung sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah menjadi bagian terpenting di dalam suksesnya setiap program yang dilaksanakan. Program yang dilaksanakan Mobil Cepu Ltd di bidang pendidikan berjalan efektif dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat, inovasi dalam setiap program pemberdayaan perlu ditingkatkan ke taraf yang lebih baik. Karena kebutuhan masyarakat setiap harinya akan semakin banyak, terutama kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Peran CSR ExxonMobil dalam bidang pengembangan ekonomi pendirian perkreditan rakyat untuk kredit usaha kecil untuk memfasilitasi terbentuknya kelompok kredit usaha perempuan melalui sistem Grameen Bank dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian bantuan modal. Selain memberikan bantuan modal, kelompok perempuan peserta program juga mendapatkan pelatihan manajemen dasar yang bertujuan untuk memberikan bekal di bidang manajemen keuangan.

Program ini dilaksanakan di 15 desa sekitar lokasi *Central Processing Facilities* di Kab. Bojonegoro dan beberapa desa di lokasi Eksplorasi (Kab. Tuban dan Blora) dan sudah memiliki anggota lebih dari 3,000 orang yang mayoritas digunakan untuk keperluan usaha tani, kelontong, dan boga.

Dalam proses pendampingannya, MCL bekerjasama dengan Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan Yayasan Mitra Dhuafa (Yamidha). Program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas di sektor ekonomi

tidak di dukung oleh ketersediaan dana, oleh karena itu Mobil Cepu Ltd berinisiatif menuangkan program CSR dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat yang dapat memberikan peluang untuk masyarakat agar mandiri dalam mengelola potensi ekonomi di bidang pertanian maupun perdagangan.

Program ini merupakan kerjasama MCL dengan Pemda Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan adanya kegiatan yang sistematis dalam mengelola dan menata keberadaan PKL yang menjamur di Kota Bojonegoro. Kegiatan yang diberikan meliputi pembentukan paguyuban PKL, pelatihan manajemen bisnis, dan pelatihan *food safety management* kepada pelaku usaha kaki lima di Kota Bojonegoro.

Pengembangan potensi ekonomi lokal di Bojonegoro program ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) peningkatan hasil pertanian/perternakan masyarakat, dan (2) peningkatan lingkungan bisnis yang lebih kondusif terhadap peningkatan hasil pertanian/peternakan itu sendiri.

Pelatihan manajemen baru bagi wirausahawan baru bertujuan untuk memberikan wawasan dan ketrampilan berwirausaha bagi wirausahawan baru skala kecil dan menengah, yaitu peningkatan kapasitas SDM (aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental), spesialisasi produk wilayah, pengelolaan usaha, pengembangan jaringan pasar dan akses ke lembaga keuangan.

Peningkatan kualitas jalan poros desa tujuan dari program peningkatan kualitas jalan poros desa adalah untuk meningkatkan kualitas

fasilitas umum yang dapat mendorong kemajuan pembangunan desa. Proses pemilihan program dilakukan sendiri oleh perwakilan masyarakat melalui proses “*community action planning*” dengan menyelaraskan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara swadaya sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dari warga masyarakat. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, LSM pendamping (Institute Research and Empowerment dan Pos Keadilan Peduli Ummat) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan. Bentuk bantuan program ini dengan sistem In – Kind/Natura dan program Berkelanjutan.

Dari prosentase pertumbuhan ekonomi pada penyajian data mengindikasikan bahwa kontribusi ExxonMobil melalui pelaksanaan CSR oleh bantuan Mobil Cepu Ltd dalam membantu pembangunan daerah untuk meningkatkan sektor perekonomian di daerah Banyu Urip khususnya, dan pada wilayah Kabupaten Bojonegoro pada umumnya, memberikan peningkatan yang signifikan. Disinilah peran sektor swasta, melalui program CSR yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program jangka panjang yang diberikan oleh Mobil Cepu Ltd adalah program Global Women in Management (GWiM), program ini bertujuan untuk kaum perempuan dalam memperoleh bekal manajemen organisasi dan pelatihan kepemimpinan. Dengan mengambil sasaran perempuan, Mobil Cepu Ltd berupaya nantinya untuk memberikan efek ganda bagi masyarakat. Karena perempuan berpendidikan akan

cenderung dapat meningkatkan kesehatan dan mampu mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan strategi berwirausaha.

Bukan sekedar pelatihan untuk menunjang kegiatan kewirausahaan disentra lading Migas Banyu Urip. Mobil Cepu Ltd juga memberikan bantuan pinjaman modal bagi masyarakat di sekitar pengeboran di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, manfaat dari perkreditan usaha rakyat yang menyerupai arisan ini sangat membantu bagi masyarakat yang kesulitan dengan masalah permodalan untuk kebutuhan usahanya.

Mobil Cepu Ltd bermitra dengan Grameen Bank yang berbasis simpan pinjam ini memberikan bantuan permodalan bagi pedagang kecil di wilayah sekitar sumur minyak Banyu Urip yang dikelola Lembaga Penguatan Perempuan Mandiri (LP2M). Serta pelatihan dan bantuan permodalan juga diberikan Mobil Cepu Ltd pada pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan bersama BMT.

Program di bidang perekonomian juga berbasis pada perkembangan sektor peternakan dan pertanian. Program kemasyarakatan yang dilaksanakan Swisscontact Indonesia Foundation ini dilaksanakan di 15 desa di Kecamatan Kalitidu dan Ngasem.

Dalam program ini Swisscontact mengandalkan tiga program andalan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, yakni kandang belajar sapi rakyat (KBSR), budidaya singkong, dan jagung. Pada tahap I ini, Swisscontact telah membangun kandang kurang lebih seluas 1 hektar di Desa Brabowan, Kecamatan

Ngasem dan mengisinya dengan Sapi Cross dan Peranakan Ongol. Program ini memberikan manfaat yang besar bagi warga di sekitar sumur minyak Banyu Urip, dan dalam implementasinya memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan di sektor peternakan.

Serangkaian program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi telah diberikan oleh ExxonMobil, meskipun belum sepenuhnya mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat, namun beragam program yang dilaksanakan telah terasa manfaatnya.

Bahwasannya memang perlu memakan waktu untuk mengubah taraf hidup masyarakat dari tingkat kemiskinan menjadi sejahtera, perlu dukungan pemerintah daerah selaku pihak yang paling berperan dalam memajukan kesejahteraan daerah, dan sektor swasta sebagai mitra dan pendukung pembangunan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diberikan ExxonMobil.

Peran CSR ExxonMobil dalam bidang kesehatan Setelah melalui serangkaian *assessment*, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan Poliklinik Desa (Polindes) adalah minimnya peralatan kesehatan yang ada.

Peningkatan kualitas dan pelatihan kesadaran sanitasi lingkungan bertujuan meningkatkan kesehatan dan budaya sanitasi melalui penyediaan air bersih, pelatihan manajemen air dan sanitasi. Pelatihan manajemen pelayanan dan peningkatan fasilitas puskesmas, bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian layanan kesehatan keliling dan makanan tambahan serta membangun kesadaran hidup sehat.

Kegiatan ini merupakan prakarsa MCL dan LSM lokal yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat, Community Health Centre. Bantuan sepeda motor sampah, sebagai sarana penunjang operasional Pemerintah Daerah terhadap upaya penataan lingkungan dan kebersihan di Bojonegoro.

Peningkatan Kualitas Bidan Desa bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis bidang kebidanan dalam membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga. Bidan merupakan pintu terdepan dalam pelayanan dalam membangun kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan umur harapan hidup dari 68 tahun pada 2010 ini, menjadi 70,6 tahun pada 2013 mendatang. Juga menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 14 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010, menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup pada 2013, dan menurunkan angka kematian Ibu (AKI), dari 100 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun ini, menjadi 94 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2013.

Dalam program peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan dasar ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yakni persiapan dan pembentukan tim kerja teknis, pelatihan pendampingan, kegiatan kelas ibu, konseling, pemberdayaan dukun bayi, monitoring, evaluasi dan seminar akhir.

Sasaran utama dalam program ini adalah bidan desa, dukun bayi, ibu hamil dan balita. Dari hasil survey yang dilakukan di daerah sasaran program menemukan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar maupun bidan desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kurangnya koordinasi lembaga non pemerintah dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan. Terbatasnya anggaran pelatihan, kondisi geografis, keterbatasan mentoring, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Melalui program ini diharapkan nantinya dapat mengangkat kualitas kesehatan dasar dan bidan desa dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Membangun kesehatan tidak hanya berpedoman pada pembangunan sarana dan infrastruktur saja, membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kesehatan juga sangat diperlukan dalam pengembangan kesehatan. Jika kesadaran akan kesehatan dari masyarakat sudah terpupuk secara baik, fasilitas infrastruktur akan sangat bisa mendukung program.

Harapan dari masyarakat yaitu agar program pemberdayaan bidang kesehatan lebih tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat, karena selama ini

program yang telah diberikan oleh Mobil Cepu Ltd kurang merata dan tidak tepat sasaran, masyarakat membutuhkan inovasi baru dalam program pengobatan gratis ini.

Pengobatan gratis ini sistemnya secara periodik, bertujuan agar kesehatan masyarakat lebih baik lagi. Kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemberdayaan di sektor kesehatan ini akan menjadi acuan Mobil Cepu Ltd dalam merumuskan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) selanjutnya.

Mekanisme dalam pelaksanaan program pemberdayaan di bidang kesehatan perlu melibatkan peran serta pihak kecamatan, agar program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Paling tidak dengan koordinasi yang baik bisa membantu untuk memberikan solusi terbaik untuk warga yang belum ikut menerima bantuan.

(3). Kendala-kendala dalam Implementasi CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh Mobil Cepu Ltd.

1. Persepsi dan Komitmen dengan Pemerintah dan Masyarakat masih belum kondusif

Sedangkan model implementasi kebijaksanaan yang dikembangkan oleh Daniel A. Sabatier ini dalam Wahab (1990:67) lebih dikenal dengan model kerangka analisis implementasi (*A framework for implementation analysis*). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting ini dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- (1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
- (2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- (3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Tuntutan kesejahteraan dan keselamatan dari warga sekitar sumur minyak Banyu Urip merupakan salah satu motivasi Mobil Cepu Ltd sebagai anak perusahaan ExxonMobil dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari agenda *Corporate Social Responsibility* (CSR). Persepsi mengenai kegiatan CSR yang beragam di kalangan masyarakat seringkali menimbulkan kesenjangan maupun juga memicu konflik, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program CSR merupakan salah satu alasan masyarakat untuk cenderung memojokkan keberadaan Mobil Cepu Ltd.. Pihak Mobil Cepu Ltd melaksanakan program pemberdayaan ini dengan menerapkan sistem jangka panjang yang bisa dirasakan perubahan signifikan dalam 20 sampai 30 tahun mendatang, oleh karena itu kekurangan Mobil Cepu Ltd, terutama dalam permasalahan kurang

meratanya program yang diberikan merupakan bagian dari proses yang memang belum diselesaikan secara keseluruhan.

Seperti Model implementasi kebijaksanaan yang dikembangkan oleh Daniel A. Sabatier, menjelaskan pada variabel ketiga yaitu Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, bahwasannya program jangka pendek yang diberikan oleh pihak ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd merupakan pembukaan atau awal dari terbentuknya hubungan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang kurang memahami CSR berpikiran bahwa tuntutan terhadap pembangunan dilimpahkan sepenuhnya terhadap MCL selaku perusahaan asing yang mengelola sumur minyak Banyu Urip. Kurang meratanya program yang diberikan menjadi alasan utama untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap Mobil Cepu Ltd sebagai pelaksana CSR ExxonMobil.

Pada dasarnya pembangunan terhadap sektor pendidikan, kesehatan maupun pengembangan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehubungan dengan kegiatan industri Migas di sumur minyak Banyu Urip yang kemudian mewajibkan Mobil Cepu Ltd untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar, masyarakat berpersepsi bahwa Mobil Cepu Ltd merupakan tumpuan mereka. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan CSR tidak lepas dari peran pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun mitra dalam pelaksanaan

kegiatan CSR, sehingga komitmen antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus dipertajam lagi agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial maupun konflik antar warga di sekitar sumur minyak Banyu Urip.

Untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri, Namun akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk sebuah kerjasama.

2. Keterbatasan SDM

ExxonMobil melaksanakan kegiatan CSR melalui Mobil Cepu Ltd, dilaksanakan mulai tahun 2006 dan telah memberikan perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip, walaupun belum sepenuhnya tuntutan masyarakat dapat terealisasi. Sinergitas antara pihak Mobil Cepu Ltd dengan pemerintah dan pendamping seperti LSM lokal maupun dari luar Kabupaten merupakan faktor penting dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan CSR.

Variabel kedua menurut pendapat Daniel A. Sabatier adalah Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, seringkali dalam pelaksanaan kegiatan CSR, pihak Mobil Cepu Ltd tidak bisa memaksimalkan pelaksanaan CSR karena Sumber Daya Manusia yang terbatas dan mengakibatkan kinerja yang lambat dalam mekanisme pelaksanaan serta dalam mewujudkan tuntutan dari masyarakat. Sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan misi pemerintah dan LSM agar dapat menghasilkan output yang maksimal

dalam bentuk program-program pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* telah menunjukkan perubahan taraf sosial maupun sudah mulai bisa menunjukkan perubahan di wilayah sekitar sumur minyak Banyu Urip.
 - a. Mekanisme pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat dapat memicu kemandirian dan keterampilan baru, sehingga disamping mereka mendapatkan kesejahteraan dari program CSR ExxonMobil, juga dapat memperoleh wawasan yang beragam dengan adanya program-program pelatihan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
 - b. Pola pelaksanaan program CSR ExxonMobil yang dilaksanakan oleh anak perusahaannya, yaitu Mobil Cepu Ltd menggunakan sistem keberlanjutan dan dengan swadaya masyarakat diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip ke taraf yang lebih baik.
 - c. Output dari kegiatan CSR ExxonMobil meliputi 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi. Serta ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan kegiatan usaha ExxonMobil.

2. Peran Kebijakan CSR ExxonMobil mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap taraf hidup yang lebih baik terhadap masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip dan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Kendala-kendala yang dihadapi yakni komitmen ExxonMobil dengan pemerintah dan masyarakat yang kurang kondusif serta keterbatasan SDM dalam mekanisme pelaksanaan CSR ExxonMobil

B. Saran

Adapun saran yang berkaitan dengan temuan penelitian ini adalah:

1. Hendaknya program kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang ada tidak hanya untuk kepentingan citra perusahaan saja, tetapi lebih dari kesadaran bahwa sesama umat manusia kita harus saling membantu. Dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat sekitar sumur minyak Banyu Urip.
2. Dengan adanya program *Corporate Social Responsibility* hal yang diharapkan adalah pembangunan yang terus berkembang pesat, tidak hanya diharapkan dari kinerja pemerintah, tetapi juga kinerja pemerintah dan masyarakat sehingga semua pihak bisa berjalan seimbang berdasarkan fungsi pembagian kerja. Pembentukan institusi swadaya dari bawah perlu diakui sebagai pelaksana berbagai fungsi, seperti perwakilan, pertukaran informasi, pendidikan dan pengawasan kualitas.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* hendaknya melibatkan LSM lokal, sehingga program yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Masyarakat hendaknya difungsikan sebagai subyek penting dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, dan dalam pembuatan program *Corporate Social Responsibility* juga dengan persetujuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu melakukan koordinasi secara matang dengan stakeholders pelaksana *Corporate Social Responsibility* termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat secara langsung.
5. Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diharapkan dapat konsisten dan merata untuk setiap wilayah di sekitar sumur minyak Banyu Urip agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar desa.
6. Inovasi dalam setiap program *Corporate Social Responsibility* juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan akan bermanfaat untuk berbagai pihak, yakni pihak Mobil Cepu Ltd, pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rosali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 1998. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- _____. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rienika cipta
- _____. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Alfian, 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta, Gramedia
- Dunn, William. 2000. (*Terjemahan Samudra Wibawa, Agus Herwanto Hadna, Erwan, Agus purwanto, Penyunting; Muhadjir Darwin*) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R. N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media-Gramedia.
- Effendi, Sofian. 1990. *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas*. Solo.
- _____. 2004. *Paradigma Pembangunan Kelembagaan Publik dan Reinventing Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- _____. 1993. *Strategi Administrasi Dan Pemerataan Akses Dan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Laporan Penelitian Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Friedman, John, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell, 1992.
- Islamy, I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Islamy, M. Irfan., 1998. *Agenda Kebijakan Administrasi Negara*. Malang: Universitas Brawijaya.
- _____. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1984. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika.
- Keban, Y. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Cetakan pertama*. Yogyakarta : Gava media
- Miles, B dan Michael Huberman, A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press

- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kedua Puluh Dua*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- _____. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* 122 a. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- _____. 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1993. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, Riant, D. 2001. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soenarko. 1998. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Papyrus.
- Thoha, Miftah. 1992. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Media Wingamantala.
- _____. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR- Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Widyaiswara
- _____. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insane Cendekia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress.
- Yeremias, T.Keban. 1995. *Forecasting Dalam Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang :**
- UU No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 47.
- Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007
- Internet :**
- All-about-theory.blogspot.com/2010/03/implementasi-kebijakan.html
- Dyah Pitaloka, *Memperkuat CSR, Memberantas Kemiskinan*, [http:// www.suaramerdeka.com/ harian/0708/02/opi04.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/02/opi04.htm) (diakses pada tanggal 10 November 2010)
- Elkington, John . 1997. *Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Capstone Publishing Ltd, London. (diakses pada tanggal 10 November 2010)
- <http://www.csrindonesia.com>
- <http://business.enveroment.wordpress.com>
- Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Porter, Michael E. dan Mark R.Kramer (2006), "*The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*", dalam Harvard Business Review, Desember, halaman 5 (diakses pada tanggal 10 November 2010)

Wikipedia (2008), *Corporate Social Responsibility*, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (diakses 20 Februari)





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526
BOJONEGORO

Bojonegoro, 3 Maret 2011

Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Bojonegoro
2. Sdr. Kepala BPMD Kab.Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Dinas PU Kab.Bojonegoro
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab.Bojonegoro
6. Sdr. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
7. Sdr. Kabag. SDA Kab.Bojonegoro
8. Sdr. Camat Ngasem
9. Sdr. Camat Kalitidu

Di

BOJONEGORO

SURAT-PENGANTAR

Nomor : 072 / **123** /204.412 / 2011

Dasar :

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dan Kantor Kab.Bojonegoro
2. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No.188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perijinan.
3. Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No.1087/H10.3/PG/2010 tanggal 25 Februari 2011 perihal riset/survey

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **IKVINA MAGHFIR**
2. N I M : 0710310040
3. Prodi / Konsentrasi : Administrasi Publik /Non Konsentrasi
4. Judul : Implementasi Kebijakan CRS PT Exxon Mobile Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar.
(Studi Kasus Pada Masyarakat Banyu Urip Kab. Bojonegoro)
5. Alamat : Jl. Raya Sugihwaras 366 Bojonegoro
6. Waktu : Tmt 3 Maret 2011 s/d 3 Juni 2011

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitasi untuk kepentingan **riset/survey** ,dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. **Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirim 1 buah hasil penelitian/ survey/ reserch/ KKN, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.**
7. Surat pengantar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BOJONEGORO



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 545/049/412.15/2011

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARNASZ SETYAWAN, ST
Jabatan : Kasubag Penataan dan Konservasi
Instansi : Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ikvina Maghfir
NIM : 0710310040
Tingkat/Semester : 8
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi : Non Konsentrasi
Alamat Mahasiswa : Jl. Raya Sugiharwas No.366 – Bojonegoro

Telah melaksanakan riset di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan judul **Implementasi Kebijakan CSR PT. Exxon Mobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Banyu Urip Kab. Bojonegoro)**.

Demikian surat keterangan di dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An, Kepala Bagian Sumber Daya Alam
Kasubag Penataan dan Konservasi


ARNASZ SETYAWAN, ST.
NIP. 99740813 200112 1 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)**

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145; Telp. (0341) 553737, 568914 556703 dan 551611 Pes. 205
Fax. (0341) 553737; E-mail: fia@brawijaya.ac.id
Program Studi: S1 Adm Publik, S1 Adm Bisnis, DIII Kesekretariatan, DIII Pariwisata, Magister Ilmu
Administrasi & Bisnis, dan S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 1846 /H10.3/ PE /2011
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. PR Mobil Cepu Ltd.
Di Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

1. Nama Mahasiswa : Ikvina Maghfir
 - a. N I M : 0710310040
 - b. Tingkat/Semester : 8
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Konsentrasi : Non Konsentrasi
 - e. Alamat Mahasiswa : Jl. Raya Sugiharas No.366 - Bojonegoro
2. Tema Riset/Survey : Implementasi Kebijakan CSR PT. Exxon Mobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Banyu Urip Kab. Bojonegoro)
3. Tempat Riset/Survey : Mobil Cepu Ltd. Bojonegoro
4. Lamanya Riset/Survey : 3 Minggu
5. Peserta : 1 Orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Februari 2011

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



DR.MR.Khairul Muluk S.Sos,M.Si
NIP 197105101998031004

Mobil Cepu Ltd.

Jln. Olah Raga 7C
Cepu - 58312
Gentral Java

FORMULIR TAMU VISITOR FORM

Hari senin Tanggal 07/03/11 Jam 14.30
Day Date Time

Nomor & Warna tanda tamu
Number & Visitor badge Colour

1. Nama : Ibuina
Name

2. Perusahaan : Universitas Brawijaya
Company

Alamat :
Address

Alamat Rumah :
Home Address

3. Tujuan : BP. Ichwan
Addresse

4. Dengan/tidak dengan perjanjian :
Whit/without appointment

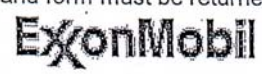
5. Tanda tangan tamu :
Signature of visitor

6. Tanda tangan yang dikunjungi :
Signature of visited person

7. Selesai berkunjung :
End of visit

8. Nama & paraf petugas :
Name and officer signature

Badge tamu dan formulir tamu harus dikembalikan kepada petugas
Visitor badge and form must be returned to the receptionist





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145; Telp. (0341) 553737, 568914 556703 dan 551611 Pes. 205
Fax. (0341) 553737; E-mail: fia@brawijaya.ac.id
Program Studi: S1 Adm Publik, S1 Adm Bisnis, DIII Kesekretariatan, DIII Pariwisata, Magister Ilmu
Administrasi & Bisnis, dan S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 1047/H10.31/PPG/2011
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Ketua LSM IRE
Di Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

1. Nama Mahasiswa : Ikvina Maghfir
 - a. N I M : 0710310040
 - b. Tingkat/Semester : 8
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Konsentrasi : Non Konsentrasi
 - e. Alamat Mahasiswa : Jl. Raya Sugihwaras No.366 - Bojonegoro
2. Tema Riset/Survey : Implementasi Kebijakan CSR PT. Exxon Mobil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Banyu Urip Kab. Bojonegoro)
3. Tempat Riset/Survey : LSM IRE
4. Lamanya Riset/Survey : 3 Minggu
5. Peserta : 1 Orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Februari 2011
a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



[Signature]
DR. M. R. Khairul Mukhlis, S.Sos, M.Si
NIP.197105101998031004